

ISBN 978-602-1178-15-7

Prosiding

Seminar Nasional

**70 Tahun Indonesia Merdeka
(Prospek dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan
dalam Menanggapi Persoalan Bangsa)**

Padang, 17 Oktober 2015

Editor: Isnarmi Moeis

PENERBIT UNP PRESS PADANG
 **UNP PRESS**

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL
Tema: 70 TAHUN INDONESIA MERDEKA
(Prospek dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan
dalam Menanggapi Persoalan Bangsa)
Padang, 17 Oktober 2015**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA
PASAL 72
KETENTUAN PIDANA SANGSI PELANGGARAN

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000, 00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000, 00 (lima milyar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL
Tema: 70 TAHUN INDONESIA MERDEKA
(Prospek dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan
dalam Menanggapi Persoalan Bangsa)
Padang, 17 Oktober 2015**



**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL**

Tema:

70 TAHUN INDONESIA MERDEKA

(Prospek dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan
dalam Menanggapi Persoalan Bangsa)

ISBN:

978-602-1178-15-7

PENERBIT

UNP Press

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Maria Montessori, M.Ed., M.Si

Dr. Fatmariza, M.Hum

EDITOR KEPALA

Dr. Isnarmi Moeis, M.Pd, M.A

EDITOR PEMBANTU

Dr. Junaidi Indrawadi, S.Pd., M.Pd

Alia Azmi, S.IP., M.Si

EDITOR BAHASA

Dr. Abdurahman, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan ke hadirat Allah swt, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan telah dapat diterbitkan. Seminar dengan tema “70 Tahun Indonesia Merdeka: Prospek dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menanggapi Persoalan Bangsa,” telah dilaksanakan pada tanggal 17/18 Oktober 2015 di Aula Fakultas Ilmu Pendidikan Lt. 4 Universitas Negeri Padang, yang diselenggarakan oleh Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, yang dihadiri oleh 148 peserta.

Seminar nasional ini diselenggarakan sebagai bentuk perhatian terhadap persoalan kebangsaan yang dihadapi pemerintahan Presiden Joko Widodo berkaitan dengan nilai dan karakter bangsa seperti; sikap boros dan konsumtif, kekerasan terhadap anak dan perempuan, melemahnya nilai-nilai kesantunan terhadap pemimpin dan orang tua, kasus-kasus korupsi, dan semakin maraknya ideologi sekuler yang merongrong ideologi Pancasila. Seminar ini merupakan media saling menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, sumbang saran dalam mengatasi persoalan kebangsaan.

Prosiding ini memuat makalah seminar dari berbagai hasil penelitian mengenai persoalan kebangsaan yang dibagi menjadi empat sub tema; pendidikan pembelajaran, sosial budaya dan kemasyarakatan, politik hukum dan pemerintahan, filsafat dan ideologi negara. Makalah berjumlah 13 buah berasal dari dosen PPKn pada PTN dan PTS, guru PPKn dan alumni PPKn, baik yang berprofesi sebagai praktisi, politisi dan wiraswasta serta mahasiswa S1 dan S2.

Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan pembelajaran dalam membahas nilai-nilai dan karakter bangsa dalam pengembangan pendidikan kewarga-

negara di masa yang akan datang. Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.

Padang, November 2015
Ketua Panitia Seminar dan
Mubes Alumni Pkn

Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
1. PROSPEK DAN TANTANGAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) DALAM MENGHADAPI PERSOALAN BANGSA Udin S. Winatapura	1
2. PENILAIAN AFEKTIF PADA PEMBELAJARAN PPKn DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA PADANG Maria Montessori, Ambiyar	52
3. INTEGRASI PANCASILA SEBAGAI <i>CHARACTER BUILDING</i> DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN FORMAL Akmal Sutja, Irzal Anderson	67
4. URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBANGUN KARAKTER KEBANGSAAN PESERTA DIDIK Sudirman	79
5. REDEFINISI KONSEP “KEWARGANEGARAAN” (<i>CITIZENSHIP</i>) DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM UPAYA MENGHADAPI TANTANGAN BANGSA Isnarmi Moeis	100
6. TANTANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI MASA DEPAN (Ditinjau dari Prespektif Pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan) Inge Angelia.....	112
7. GENDER DAN PERTIMBANGAN MORAL (Strategi Pengembangan Pembelajaran PPKn yang Bernilai) Fatmariza.....	119

8. PENDANAAN PARTAI POLITIK UNTUK PENDIDIKAN POLITIK (Studi Terhadap Partai X dan Partai Y di Kota Padang) Al Rafni, Suryanef, dan Aina.....	140
9. ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN KOTA PADANG DAN KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF 2014 Nurman S., Al Rafni, dan Suryanef.....	165
10. POLA RELASI KONSTITUEN DENGAN PEREMPUAN ANGGOTA LEGISLATIF HASIL PEMILU 2014 DI KOTA PADANG Suryanef, Al Rafni	185
11. MENGENAL NAGARI SUMPUR SEBAGAI NAGARI PUSAKA DI SUMATERA BARAT Susi Fitria Dewi.....	202
12. MODEL INSERT PEMBELAJARAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH DASAR Azwar Ananda, Junaidi Indrawadi.....	215
13. MODEL PERLINDUNGAN DESA/NAGARI ADAT DI INDONESIA (Kajian Dari Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia) Akmal	232

PENILAIAN AFEKTIF PADA PEMBELAJARAN PPKn DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA PADANG

Maria Montessori, Ambiyar

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

ABSTRACT

This research aims to design affective assessment tool on Civic Education in public junior high school in Padang. This type of research is the research and development. Consisted of two phases, the first step of the research focuses on analyzing the need of affective assessment. The second phase involves developing the designing of affective assessment tool followed by tryout in the field. The data was collected through observation, interview, FGD, questionnaire and instruments for affective assessment. Data was analyzed using descriptive statistic. The findings showed that the instruments developed are valid for Civic Education affective assessment, practical when used in the classroom and effective to assess students' affective development.

Keywords: *affective, assessment, civic education learning*

PENDAHULUAN

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah subjek pembelajaran yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. (Winatapura & Budimansyah, 2007). Nilai-nilai yang diusung tersebut adalah nilai-nilai yang dianggap luhur oleh bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam dasar Negara Pancasila. Oleh karena itu, fokus utamanya adalah membentuk sikap, karakter dan perilaku warganegara agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Sikap dan perilaku berada pada dimensi afektif yang berhubungan dengan emosi, perasaan, keyakinan, dan

sebagainya (Fishbeane dan Ajzen, 1973). Karena itu dimensi afektif merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran PPKn dan dengan konfigurasi yang seimbang diantara dimensi kognitif, afektif dan psikomotor akan menjadikan nilai-nilai terinternalisasi dalam diri siswa selanjutnya menjadi watak dan karakter yang akan mewarnai setiap perilakunya dalam kehidupan.

Penilaian afektif merupakan penilaian yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui taraf perkembangan yang dicapai siswa menyangkut sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan (Popham, 1995). Pada pembelajaran PPKn maka domain afektif tidak hanya meliputi sikap yang secara umum harus dimiliki siswa sebagaimana tercantum dalam Kompetensi Inti Kurikulum tahun 2013, tetapi juga meliputi sikap yang sesuai dengan Kompetensi dasar dari materi yang diberikan, misalnya sikap yang mengutamakan kesatuan atau nasionalisme.

Salah satu karakteristik dimensi afektif adalah sulit untuk diukur tingkat pencapaiannya secara langsung sebagaimana dimensi lainnya, karena itu kebanyakan pendidik mengabaikannya dalam hal penilaiannya. Pierre dan Oughton (2007) malah mengatakan bahwa domain afektif merupakan daerah yang tidak bertuan karena tidak banyak orang yang menaruh perhatian dalam membahasnya

Pengabaian terhadap pelaksanaan penilaian dalam pembelajaran terutama dalam pembelajaran PPKn disebabkan oleh banyak faktor seperti ketersediaan waktu yang tidak memadai untuk memantau dan mengobservasi perilaku siswa dan juga sulitnya merumuskan indikator serta instrumen untuk mengetahui tingkat perkembangan dan pencapaian belajar siswa tentang nilai-nilai yang mendukung sikap yang sesuai dengan Pancasila.

Pengabaian yang terus-menerus terhadap penilaian dimensi afektif dalam pembelajaran tentu saja akan mengakibatkan tidak terwujudnya penanaman nilai-nilai luhur bangsa pada diri siswa. Disamping itu akan tertanam anggapan atau persepsi pada diri siswa bahwa yang penting adalah lulus dalam ujian yang sifatnya dominan kognitif. Hal ini tentu saja

bertentangan dengan substansi pembelajaran PPKn yang telah digariskan baik secara formal dalam sistem pendidikan nasional maupun dalam kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendisain alat penilaian afektif pada pembelajaran PPKn di Sekolah Menengah Pertama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pengembangan atau Research and Development (R&D) dengan dua tahapan yaitu tahap studi pendahuluan dengan pendekatan deskriptif kualitatif guna mengetahui realitas pelaksanaan penilaian afektif di sekolah serta analisis kebutuhan dalam pelaksanaan penilaian afektif bagi guru. Tahap berikutnya adalah pengembangan alat penilaian afektif melalui Fokus Group Discussion (FGD) dan validasi ahli dan uji coba di lapangan untuk mengetahui efektivitas dan praktikalitasnya.

Penelitian dilakukan di lima Sekolah Menengah Pertama Negeri kota Padang, yaitu pada SMPN 1,7, 8, 22 dan 33 yang mewakili status sekolah bervariasi mulai dari sekolah yang tergolong sekolah unggul dan juga sekolah biasa, serta sekolah yang berlokasi di pusat kota dengan sekolah yang agak jauh dari pusat kota. Perbedaan kondisi sekolah dimaksudkan untuk mendapatkan data yang variatif serta menjangkau keadaan sekolah negeri yang berada di kota Padang.

Studi di lima SMPN menempatkan guru bidang studi PPKn dan kepala sekolah sebagai informan. Data diambil dengan menggunakan tehnik observasi, wawancara dan kajian terhadap dokumen yang terkait di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian tahap pertama, dilanjutkan dengan pengembangan disain alat penilaian afektif melalui prosedur Focus Group Discussion (FGD) dan validasi oleh ahli pendidikan serta ujicoba di lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dimensi afektif pada kurikulum tahun 2013 yang mulai diberlakukan secara nasional pada tahun 2014, mendapatkan porsi yang besar terutama pada jenjang pendidikan dasar yaitu sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Hal itu dapat dimaklumi karena usia peserta didik pada jenjang pendidikan dasar merupakan usia yang sangat tepat dalam menanamkan sikap dan nilai-nilai yang dianggap perlu dimiliki generasi muda dalam menjalani kehidupannya.

Dimensi afektif pada kurikulum PPKn tahun 2013 terlihat secara jelas dalam kompetensi inti untuk setiap kelas yaitu pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya (PP, No.68 Tahun 2013). Kompetensi ini bersifat umum dan sama untuk setiap kelas serta setiap bidang studi. Dengan kata lain, apapun bidang studinya guru diharapkan mampu membekali siswa dengan kompetensi ini yang untuk mewujudkannya perlu ditekankan lagi dalam melaksanakan pembelajaran pada setiap bidang studi di dalam dan di luar kelas.

Sesuai dengan karakteristik bidang studi PKn yang merupakan bidang studi dengan sasaran utama untuk mempersiapkan generasi mudanya menjadi warganegara yang baik dan bertanggung jawab, maka jabaran dari kompetensi inti kepada kompetensi dasar sudah diwarnai oleh karakteristik dan substansi bidang studi PKn. Hal ini dapat dicermati dari kompetensi dasar yang dijabarkan dalam kurikulum 2013. Sikap dan perilaku yang harus mendapatkan perhatian guru untuk dikembangkan dan dinilai kemajuannya pada diri siswa diantaranya adalah:

1. Kelas VII
 - a. Sikap taqwa terhadap Tuhan yang maha Esa dalam konteks sekolah dan masyarakat.
 - b. Sikap nasionalisme dan kebangsaan.

- c. Sikap patuh terhadap norma yang berlaku dalam masyarakat.
 - d. Sikap Toleransi terhadap keberbedaan yang ada.
 - e. Sikap menjunjung tinggi persatuan bangsa.
2. Kelas VIII
- a. Sikap taqwa terhadap Tuhan yang maha Esa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - b. Sikap menghargai nilai-nilai luhur Pancasila.
 - c. Sikap kerjasama dan kebersamaan.
 - d. Sikap terhadap HAM.
 - e. Sikap terhadap Pluralisme.
3. Kelas IX
- a. Sikap taqwa terhadap Tuhan yang maha Esa dalam konteks antar bangsa.
 - b. Sikap terhadap nilai- nilai patriotis me dan rela berkorban.
 - c. Sikap terhadap masalah bangsa dalam hal keberagaman.
 - d. Sikap patuh terhadap hukum / Antikorupsi.
 - e. Sikap menghargai jasa pahlawan.

Dari penjabaran sikap-sikap yang dikehendaki di atas, jelas bahwa hal itu merupakan kekhasan yang menjadi beban dari bidang studi PKn. Dengan kata lain seorang guru PKn tidak hanya mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengembangkan dan membina sikap-sikap yang dicantumkan sebagai kompetensi inti dalam kurikulum dan juga menjadi tanggung jawab semua guru untuk setiap bidang studi. Akan tetapi guru PKn juga mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membina sikap siswa yang terkait secara erat dengan bidang studi yang diajarkannya dan menjadi karakter dari bidang studi tersebut. Untuk itu aspek penilaian yang akan memonitor capaian dan perkembangannya juga seharusnya mendapatkan porsi yang memadai dalam pembelajaran, dan tidak hanya sebagai kegiatan pelengkap saja.

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan penilaian afektif pada pembelajaran PPKn, karena berkaitan dengan karakteristik

afektif yang sulit untuk dirumuskan indikator serta instrumennya. Kebanyakan contoh instrumen yang tersedia hanyalah berupa pengukuran sikap secara umum dan tidak terkait secara langsung dengan materi bidang studi Pkn. Oleh karena itu guru sangat jarang melaksanakan penilaian domain afektif secara terencana dan terstruktur sebagaimana seharusnya.

Salah satu metode dalam penilaian sikap yang banyak direkomendasi ahli adalah observasi langsung. Akan tetapi guru mengungkapkan bahwa sangat sulit untuk melaksanakan penilaian aspek afektif apabila itu dilakukan dengan menggunakan tehnik observasi langsung. Hal ini disebabkan oleh jumlah siswa yang relatif banyak dan jam mengajar guru yang juga banyak karena memenuhi syarat untuk sertifikasi. Oleh karena itu guru tidak punya kesempatan untuk mengamati setiap siswa secara langsung, begitu juga untuk mengolah hasil pengamatannya. Menurut guru akan lebih baik apabila penilaian aspek afektif dapat dilakukan secara tertulis baik melalui pengungkapan pemikiran seperti yang dikemukakan di atas atau melalui angket yang juga secara tertulis sehingga mereka mempunyai waktu untuk mengolah hasilnya di rumah atau diluar kelas tanpa harus mengganggu jam pelajaran yang dialokasikan.

Pendapat guru di atas merupakan jalan bagi peneliti untuk mengembangkan berbagai alternatif dalam menyusun instrumen penilaian aspek afektif yang berdaya guna bagi perkembangan sikap dan kepribadian siswa. Berdasarkan analisis kurikulum PPkn untuk SMP maka telah dikembangkan 15 buah instrumen penilaian afektif, dimana masing-masing kelas diwakili dengan lima instrumen. Berikut ini ditampilkan sampel untuk masing - masing kelas yaitu kelas 7, 8 dan 9.

1. Sikap nasionalisme dan kebangsaan untuk kelas 7

Item berikut ini digunakan untuk mengukur keyakinan dan sikap siswa terhadap paham kebangsaan atau nasionalisme. Siswa diminta untuk mencontreng pada kolom yang menggambarkan perasaannya terhadap pernyataan yang dikemukakan.

Tabel 1. Instrumen Penilaian Sikap Nasionalisme dan Kebangsaan

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Saya tidak merasa malu menjadi warga negara Indonesia.				
2	Menurut saya negara diperlukan oleh setiap bangsa di dunia ini.				
3	Para pahlawan yang berjuang untuk Indonesia dulu sangat besar jasanya.				
4	Saya hafal lagu Indonesia raya dengan baik.				
5	Saya senang mendengar lagu Indonesia raya dinyanyikan di even olahraga internasional.				
6	Upacara bendera disekolah menurut saya tidak begitu diperlukan karena sudah rutin.				
7	Membela negara Indonesia hanya perlu dilakukan oleh tentara.				
8	Menurut saya Indonesia bersatu adalah hal yang penting.				
9	Dari dalam hati yang dalam suatu ketika kelak saya ingin mempunyai jasa terhadap negara saya.				
10	Indonesia adalah tanah air saya dan saya mencintainya.				

Skoring

Skoring untuk instrumen ini kecuali item 6 dan 7 adalah

Sangat setuju = 4

Setuju = 3

Tidak setuju = 2

Sangat tidak setuju = 1

Sikap nasionalisme siswa yang merupakan bagian dari materi tentang Negara kesatuan republik Indonesia dikembangkan berdasarkan indikator yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari siswa setingkat sekolah lanjutan pertama. Dengan menggunakan angket, maka siswa dapat mengisinya pada waktu yang telah ditetapkan guru untuk kemudian mengolahnya pada waktu yang lainnya. Kelebihan menggunakan angket adalah siswa dapat mengemukakan perasaan atau pendapatnya dengan beberapa alternative jawaban, serta efeasien dalam penggunaan waktu dan pengolahannya.

2. Sikap menghargai nilai-nilai luhur Pancasila untuk kelas 8
Instrumen berikut ini mengungkapkan keyakinan dan sikap siswa tentang nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa Indonesia. Siswa diminta untuk memberi tanda pada kolom yang merupakan pilihannya.

Tabel 2. Instrumen Penilaian Nilai-Nilai Luhur Pancasila

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Saya hafal urutan Pancasila.		
2.	Saya percaya bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai yang baik bagi bangsa Indonesia.		
3.	Menurut saya banyak orang Indonesia tidak mengamalkan Pancasila dalam kehidupannya.		
4.	Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila menunjukkan beda kita dengan bangsa lainnya.		
5.	Tidak mau berkelahi dengan siswa sekolah lain dalam menyelesaikan perbedaan pendapat merupakan penerapan nilai Pancasila.		
6.	Saya percaya bahwa nilai-nilai Pancasila itu perlu diamalkan dan dipertahankan bagi bangsa Indonesia.		
7.	Di sekolah saya bagaimana menerapkan kehidupan yang demokratis senantiasa dibiasakan dan dicontohkan.		
8.	Saya merasa bangga bahwa negara Indonesia punya filsafat dan dasar negara yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri.		
9.	Tidak mencontoh habis segala sesuatu yang datang dari luar negeri menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai harga diri dan identitas sendiri.		
10.	Saya merasa bertanggung jawab untuk mengamalkan pancasila dalam kehidupan.		

Skoring

Ya = 1

Tidak = 0

Sikap terhadap sesuatu seringkali ditentukan oleh keyakinan yang dimiliki berhubungan dengan hal tersebut. Karena itu sikap terhadap nilai-nilai luhur Pancasila dapat diungkapkan dengan mengetahui keyakinan yang dipegang siswa tentang

Pancasila. Untuk itu beberapa item di atas disusun untuk mengungkap keyakinan siswa tersebut. Berdasarkan jawaban yang dikemukakan siswa guru akan dapat mengetahui ketepatan atau perkembangan keyakinan yang dimiliki siswa untuk kemudian menentukan langkah intervensi berikutnya.

3. Sikap terhadap nilai-nilai patriotisme dan rela berkorban bagi bangsa dan negara untuk kelas 9

Instrumen untuk mengukur sikap patriotisme dan rela berkorban menggunakan penilaian diri sendiri. Siswa diminta untuk menuliskan pikirannya pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan kriteria yang diminta seperti berikut.

Topik : Siswa: Tanggal :

No.	Deskripsi
1.	Cinta negara dan bangsa menurut saya adalah :
2.	Hal yang akan saya lakukan untuk menunjukkan cinta negara dan bangsa adalah:
3.	Perasaan saya terhadap keadaan negara dan bangsa Indonesia adalah:
4.	Harapan saya untuk Indoneasia di masa depan adalah:
5.	Sikap saya terhadap maraknya kerusuhan yang ada di Indonesia adalah:

Mengungkapkan perasaan dan pendapat tentang suatu hal melalui tulisan sendiri merupakan cara yang tepat untuk mengetahui tentang apa yang dipikirkan dan kecenderungan sikap yang dimiliki siswa. Melalui esai pendek tentang pertanyaan yang dikehendaki akan memberi wawasan kepada guru tentang perkembangan sikap dan moral siswa, sehingga dapat melakukan tindakan berikutnya guna mengarahkan siswa kepada sikap yang dikehendaki. Agar jawaban siswa tidak melenceng jauh dari apa yang diharapkan guru, maka guru dapat menambahkan kata kunci yang harus digunakan siswa dalam mengungkapkan pendapatnya. Misalnya untuk kategori cinta negara pada poin satu, maka harus ada di sana objek,

masyarakat, Indonesia dan negara. Menggunakan kata kunci tersebut siswa diminta untuk mengungkapkan pikirannya terkait cinta negara.

Dari hasil analisis data yang diperoleh dapat dikalsifikasikan atas beberapa kategori, yaitu validitas alat penilaian yang dikembangkan, efektivitas dan paraktikalitasnya ketika digunakan di sekolah. Uji validitas dari validator terhadap instrumen untuk setiap instrumen yang dikembangkan mendapatkan nilai rata-rata diatas 4,5 dengan rentangan nilai tertinggi adalah 5. Hal ini berarti bahwa dalam pandangan validator instrumen yang dikembangkan berada pada kategori valid karena itu layak untuk digunakan dalam penilaian sikap siswa pada pembelajaran PPKn di SMP. Validitas ini baik dari segi konstruk, materi dan bahasa dapat dicapai karena mempedomani beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Diantaranya dari Neuman, Allen Karen & Friedman, Bruce D (2010). Para peneliti ini meyakini bahwa pengungkapan sikap siswa pada dasarnya adalah mencoba mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya mereka lakukan secara reflek akan tetapi yang perlu diketahui adalah latar belakang dari sikap yang mereka tunjukkan.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Fishbean, Martin & Icek Ajzen. (1973) bahwa sikap seseorang didasari oleh keyakinan dan kepercayaan yang dimilikinya ditambah dengan adanya kemauan atau intensi baru akan menjadi perilaku. Oleh karena itu, instrumen penilaian yang dikembangkan ini mencoba menggali keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki siswa untuk mengungkap kecenderungan sikap dan perilaku yang dimilikinya dilacak terlebih dahulu melalui keyakinan yang dimilikinya tentang sesuatu. Sebagai contoh mengukur sikap bangga terhadap para pahlawan, maka guru perlu terlebih dahulu mengungkapkan keyakinan siswa siapa yang menurut mereka dapat disebut pahlawan bukan hanya tokoh-tokoh yang diajarkan guru di kelas. Berdasarkan panduan teori-teori tersebut dikembangkan instrumen yang bahasa dan materi serta konstruksinya disesuaikan untuk anak usia SMP.

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh maka diketahui bahwa instrumen penilaian afektif ini praktis untuk dilakukan di sekolah. Dari 9 orang guru dari lima SMPN di Kota Padang menyatakan bahwa mereka bisa melaksanakannya di sekolah. Skor rerata maksimum dari kesembilan guru sebesar 3,31 dengan skor maksimum 4. Hal ini dimungkinkan karena instrumen yang dikembangkan tidak mengharuskan mereka mengamati setiap siswa secara langsung sebagaimana biasa. Akan tetapi beberapa instrumen yang diisi siswa memberi mereka ruang untuk memeriksa dilain waktu kemudian menginterpretasikan apakah jawaban atau pilihan siswa menunjukkan kecenderungan pada sikap yang dikehendaki.

Kesulitan utama yang selama ini dihadapi guru dalam penilaian afektif adalah dalam merumuskan item dan indikator serta skoringnya. Instrumen yang dikembangkan ini telah dapat membantu guru mengatasi kesulitan tersebut sehingga mereka menganggap bahwa instrumen ini cukup praktis untuk digunakan dalam pembelajaran PPKn. Praktikalitas, memang menjadi salah satu kriteria yang dapat dipakai guru dalam melaksanakan penilaian hasil belajar termasuk hasil belajar afektif pada bidang studi PPKn. Sebagaimana di tegaskan oleh Neuman, Allen Karen & Friedman, Bruce D (2010).

Efektivitas instrumen penilaian afektif yang dikembangkan ini diuji melalui tiga bagian, yaitu menyangkut persepsi guru tentang instrumen, persepsi siswa tentang instrumen penilaian afektif, serta hasil belajar afektif siswa itu sendiri. Baik guru maupun siswa menanggapi secara positif instrumen yang dikembangkan. Hal ini mungkin karena selama ini guru dan siswa jarang sekali menggunakan instrumen penilaian sikap, sehingga ketika diminta untuk melaksanakan penilaian sikap menggunakan instrumen yang telah disediakan mereka merasa antusias untuk melakukannya sehingga memberikan persepsi yang positif.

Di samping hal di atas guru PPKn juga jarang mendapatkan pelatihan dalam mngasah kemampuan mereka mengembangkan alat ukur yang sesuai standar, sehingga penilaian sikap yang dilakukan selama ini hanyalah mengguna-

kan form yang telah ada dalam kurikulum menyangkut sikap-sikap yang sangat umum seperti jujur dan bertanggung jawab. Akan tetapi ketika menilai sikap nasionalisme dan penghargaan terhadap HAM biasanya hanyalah menyangkut pengetahuan tentang sikap bukan sikap dan kecenderungan yang dimiliki siswa. Adisusilo, Sutarjo. J R (2012) mengemukakan bahwa mengetahui dan menilai sikap siswa tentang sesuatu merupakan bagian dalam proses pembelajaran afektif dan itu memerlukan tehnik dan alat yang berbeda dengan penilaian pada ranah kognitif.

Sehubungan dengan hasil belajar yang dicapai siswa tentang sikap-sikap yang ingin dikembangkan secara umum berada pada kategori baik dengan rata-rata di atas 80. Hal ini dimungkinkan karena sikap bukanlah hal yang diperoleh secara instan akan tetapi melalui proses panjang. Sebagian besar siswa sudah terpapar juga dengan beberapa materi yang telah dibahas sebelumnya. Meskipun ada beberapa siswa belum mencapai KKM, hal ini dikarenakan instrumen yang dikembangkan ini adalah untuk kurikulum selama satu tahun, dan keterbatasan waktu penelitian tidak memungkinkan untuk mengujicobakannya sesuai kalender pendidikan di sekolah. Oleh karena itu ada kemungkinan ada materi yang belum tereksplorasi sebelumnya oleh guru pada semester pelaksanaan penelitian. Hal ini dianggap sebagai keterbatasan dari penelitian ini yang mungkin dapat diperbaiki di masa datang.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penilaian afektif pada pembelajaran PPKn merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan guru dalam rangka pencapaian tujuan bidang studi PPKn di Sekolah Menengah Pertama. Pada umumnya guru mengetahui dan memahami bahwa penilaian afektif merupakan karakteristik dari bidang studi yang diampunya dan menghendaki penilaian yang tepat untuk itu.

Karakteristik domain afektif yang lebih sulit untuk diungkapkan karena menyangkut perasaan, keyakinan dan emosi, menyebabkan guru merasa kesulitan untuk melaksana-

kannya di sekolah. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya diantaranya adalah sulitnya merumuskan indikator dan menyusun instrumen untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut. Disamping itu keterbatasan waktu yang dimiliki guru untuk pembelajaran PPKn juga menjadi penghalang dalam mengamati dan mengolah skor siswa dalam aspek afektif. Oleh karena itu guru cenderung untuk mengabaikannya dalam pelaksanaan di sekolah dan lebih fokus pada penilaian aspek kognitif saja.

Dimensi afektif dalam pembelajaran PPKn di Sekolah Menengah Pertama berdasarkan kurikulum tahun 2013 dapat dikelompokkan atas dua bagian. Pertama adalah sikap secara umum yang menjadi Kompetensi Inti (KI) yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun dan percaya diri. Sikap ini dikembangkan di setiap bidang studi. Sedangkan sikap-sikap yang sesuai dengan Kompetensi dasar khusus untuk bidang studi PPKn mulai dari kelas VII sampai kelas IX terdapat lima belas sikap yang perlu ditanamkan dan dikembangkan dalam diri siswa diantaranya meliputi sikap taqwa terhadap tuhan dalam konteks kehidupan disekolah, berbangsa dan bernegara serta dalam konteks antar bangsa. Sikap nasionalisme dan kesatuan, toleransi dan keberbedaan, patuh pada norma dan hukum serta menghargai jasa pahlawan.

Lima belas instrumen yang dikembangkan peneliti telah divalidasi oleh pakar dibidangnya masing-masing untuk mengetahui validitas dari instrumen tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen penilaian afektif memenuhi kriteria valid sehingga layak untuk digunakan di sekolah dalam pembelajaran PPKn. Hasil uji coba instrumen di lapangan untuk mengetahui praktikalitas dalam penggunaannya oleh guru menunjukkan bahwa instrumen penilaian afektif cukup praktis untuk digunakan karena dapat dilaksanakan dalam pembelajaran dengan kata lain tidak memerlukan waktu yang khusus, siswa mampu mengerjakannya serta skoring yang tidak terlalu sukar. Oleh karena itu, instrumen ini memenuhi kriteria praktikalitas untuk dapat digunakan di sekolah.

Hasil belajar sikap yang ditunjukkan siswa melalui alat penilaian sikap yang dikembangkan secara umum menunjukan hasil yang baik. Berarti siswa mengerti apa yang dikehendaki dari mereka. Akan tetapi memang masih ada siswa yang belum mencapai ketuntasan yang diharapkan kemungkinan karena materi ini belum lagi dibahas secara mendalam di dalam kelas oleh guru dan siswa.

Penelitian ini masih mempunyai kelemahan yaitu alat penilaian yang dikembangkan tidak bisa diujicobakan tepat pada saat guru mengajar topik terkait. Hal ini disebabkan oleh kalender pendidikan di sekolah sulit untuk menyesuaikan dengan jadwal penelitian yang membutuhkan ujicoba selama dua semester untuk setiap kelas. Akibatnya ada materi yang belum dibahas di kelas ketika penelitian dilakukan.

REFERENSI

- Anderson, Lorin W & David R, Krathwohl (2001) *Taxonomy of learning, Teaching and Assessing*. Longman : New York
- Anderson, Lorin W. (2003) *Classroom Assessment*. Lawrence Erlbaum Associates: New Jersey.
- Adisusilo, Sutarjo. J R (2012). *Pembelajaran Nilai Karakter. Konstruktivisme dan VCT Sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*. RajaGrafindo Persada : Jakarta
- Boyd, Bl, Dooley, K E & Felton, S (2005). *Measuring learning in The Affective Domain Using Reflective Writing About a Virtual Learning Experience*. Preceeding of The 21Fs Annual Conference On Agriculture Education. San Antonio
- Fishbean, Martin & Icek Ajzen. (1973). *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Addison Wesley Publishing: USA
- Neuman, Allen Karen & Friedman, Bruce D (2010). *Affective Learning: A Taxonomy for Teaching Social Work values*.

Journal of Social Work values and Ethics. Volume 7.
Number 2.

Popham, W James. (1995) *Classroom Assessment. What teachers Needs to Know*. Alyn and Bacon: Boston

Pieere, Eleanor & Oughton (2007). *The Affective Domain: Undiscovered Country*. College Quarterly. Fall 2007
Volume 10 Number 4. Centenila College.

Winatapura, Udin S & Dasim, Budimansyah (2007). *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Universitas Pendidikan Bandung: Bandung.

INTEGRASI PANCASILA SEBAGAI CHARACTER BUILDING DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN FORMAL

Akmal Sutja, Irzal Anderson
Dosen FKIP Universitas Jambi

ABSTRACT

Indonesia, a unitary state consists of various tribes, religions and races, should have an ideology that is resilient and strong enough to adhere the pluralistic society. The strength of an ideology is reflected in its ability to deal with the challenges of the increasingly complex nation.

Indonesia has accepted Pancasila as the state's ideology. As an ideology it is facing internal and external challenges. One of the internal challenges is the readiness of the supporters to apply it in daily life. Meanwhile external challenges include changes of the patterns of life in the community due to the rapid development of science and technology in the increasingly globalized world.

Now most Indonesians no longer talk about its ideology's extensions but the many challenges in maintaining this country and their comforts as citizens, because the Pancasila ideology has been accepted by various groups in the society from Sabang to Merauke.

In order to deal with the challenges, strengthening Indonesia's nation and character buildings through practicing Pancasila values both objectively and subjectively is needed. Implementing Pancasila ideology also requires a strategy of applying Pancasila values as part of orders in each formal and social institution, as well as paradigm for every field of the nation's development. Also important in the development of the nation's character is to nurture the feeling of respect for state symbols and integrate character education in all levels of formal education.

Key words: *Pancasila ideology, nation's character*

PENDAHULUAN

Pertanyaan Radiman Widjojodiningrat *“Di atas dasar apa kita mendirikan Negara Indonesia kelak?* terasa penting untuk dipatirkan kembali, meskipun telah berlangsung 70 tahun 6 bulan 15 hari, sampai saat ini (16-10-2010) yakni sejak dilontarkannya pada saat mengatarkan pembukaan Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 29 Mei 1945. Setelah melalui berbagai proses; pidato dan pandangan Mr. Muh. Hatta Mr. Soepomo, Mr. M. Yamin, dan Ir. Soekarno, serta diresumkan melalui Piagam Jakarta oleh Tim Perumus, akhirnya diadopsi sebagai Pembukaan UUD 1945, maka Pendiri Bangsa telah bersepakat untuk mendudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, sekaligus sebagai ideologi bangsa kita.

Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara telah diterima oleh segenap bangsa Indonesia. Berbagai kelompok dan daerah di seluruh tanah air, tidak meragukan bahwa Pancasila adalah ideologi negara yang paling tepat untuk bangsa Indonesia yang heterogen (Sudrajat, postmaster@dephan.go.id). Bahkan, Pancasila sebagai ideologi negara telah teruji melalui berbagai pengalaman sejarah bangsa. Berbagai bentuk usaha mulai dari penolakan akan Pancasila dalam bentuk penerapan ideologi yang bersifat liberal, maupun demokrasi terpimpin atau mempersoalkan kembali (Konstituante), maupun dengan cara perlawanan bersenjata, G30S PKI, DI/TII, serta perlawanan kedaerahan (RMS, Papua, Aceh) ternyata ditolak oleh bangsa Indonesia, dan menyadarkan kita untuk menerima Pancasila sebagai ideologi negara.

Penerimaan ini juga dibuktikan; di saat genderang reformasi mulai ditabuh mahasiswa untuk melawan pemerintahan yang represif, timbul berbagai hujatan serta banyak perubahan yang disuarakan oleh kalangan intelektual kampus. Meskipun semua segi kehidupan kenegaraan dihujat, tetapi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara adalah satu-satunya yang tidak pernah dipersoalkan bahkan tidak pernah muncul keinginan untuk menggantinya. Semua komponen bangsa yang tersebar dari Papua hingga ujung Sumatera, tak memper-

debatkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Pancasila dapat diterima dan justru kembali menjadi perekat dari NKRI.

Persoalan sekarang ini, kita tidak lagi menemukan ideologi negara pengganti Pancasila, tetapi mencari cara bagaimana negara ini dipertahankan serta membuat kita nyaman sebagai warganegara. Ini tentu saja menuntut kehidupan kenegaraan kita semakin teratur, menyenangkan serta merasa bangga sebagai warga yang hidup dan bekerja di dalamnya.

KEKUATAN SUATU IDEOLOGI

Berdasarkan etimologinya, ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *idea* + *logia*. *Idea* berarti raut muka, perawakan, gagasan atau pikiran dan *logia* logos atau berarti paham atau ajaran. Jadi, ideologi diartikan sebagai ilmu atau ajaran tentang gagasan atau pikiran tertentu. Akan tetapi dewasa ini, ideologi digunakan untuk menunjukkan paham kolektif kenegaraan. Oetoyo Oesman (1991) mengartikan ideologi sebagai wawasan, pandangan hidup, atau falsafah kebangsaan dan kenegaraan yang menjawab pertanyaan secara meyakinkan: mengapa dan untuk apa mereka menjadi suatu bangsa dan mendirikan Negara.

Ideologi sebenarnya lebih dari sekedar filsafat (filsafat), filsafat diterima karena mengandung nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari hasil pemikiran kritis, spekulatif dan reflektif, tetapi tidak memaksa orang untuk melakukan tindakan untuk mendukungnya. Sementara ideologi tidak lagi mempersoalkan bagaimana kebenaran itu dihasilkan, tetapi lebih mempersoalkan bagaimana wujud perilaku atau tindakan yang harus dilakukan pendukung ideologi tersebut. Kebenaran filsafat adalah bebas nilai dan berasal dari pemikiran rasional dan logis, sementara ideologi lebih cenderung normatif, subjektif, dan kolektif dan menuntut untuk melakukan tindakan tertentu untuk mendukungnya.

Karena sifat ideologi yang demikian, terkadang terlihat bahwa ideologi sering bersifat memaksa dan doktriner ketika nilai-nilai itu hendak direalisasikan sebagaimana mestinya dalam

bentuk tindakan dan perilaku nyata. Inilah awal dari persoalan sebenarnya, kekuatan maupun kelemahan suatu ideologi. Bila ideologi tidak menuntun perilaku pendukungnya, maka ia akan menjadi filsafat, sebagai salah satu alternatif menemukan kebenaran, boleh dianut atau tidak, ditolak atau diterima. Akan tetapi bila dalam merealisasikan nilai itu bersifat memaksa dan repesif maka ideologi akan menjadi doktrin yang menakutkan. Lebih berbahaya lagi, bila motif untuk merealisasikan itu adalah untuk melanggengkan kekuasaan atau kepentingan pihak tertentu, sehingga kebenaran nilai suatu ideologi tereduksi. Kondisi ini akan membuat ideologi kehilangan fungsinya. Dalam menghadapi persoalan atau krisis, ideologi justru akan ditinggal oleh pendukungnya. Bila mengadopsi konsep Daniel Vidal, dalam tulisan Essei sur Ideologie (Touraine, 1977) maka kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 1.

	IDEOLOGI KUAT	IDEOLOGI LEMAH
NEGARADAMAI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan akan pemimpin dan institusi. 2. Masyarakat saling menghormati. 3. Konflik inters antar kelompok, lokal dan sektoral dapat dieliminasi. 4. Nilai budaya nasional tumbuh dan berkembang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Protes dan sikap opositif masyarakat, demonstrasi jadi marak. 2. Menonjolnya kepentingan pribadi dan kelompok. 3. Tidak adanya interelasi dan kesinambungan. 4. Ideologi menjadi slogan tanpa arti.
NEGARADALAMKRISIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengatasi masalah/ menemukan solusi dengan cepat. 2. Saling menerima dan memaafkan. 3. Memiliki daya tahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revolusi & meliterisasi 2. Konfrontasi langsung 3. Perpecahan/pemisahan diri 4. Kematian ideologi

Gambar 1. Ideologi dan Negara

Pengalaman sejarah telah membuktikan, meskipun sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia selalu menganut ideologi

Pancasila, tetapi nilai ideologi tersebut digunakan oleh pemegang legitimasi untuk kepentingan yang berbeda. Peralihan sistem politik dari 'liberal' kepada bentuk demokrasi terpimpin (otoriter), dari pemerintah sipil kepada pemerintahan militer; 'Orde Lama' ke 'Orde Baru, kepartaian yang multi-mayoritas kepada sistem mayoritas tunggal, dari pemisahan kepada koalisi kepentingan, semuanya menyandarkan diri kepada Pancasila.

Karena ideologi menganut suatu wawasan, konsep atau pandangan yang bersifat fundamental, maka berarti nilai ideologi itu harus masuk ke dalam setiap lini kehidupan. Artinya, setiap segi atau bidang dalam kehidupan ini harus dilandasi oleh nilai itu. Hendaknya Ideologi tidak lagi berdiri sendiri menjadi acuan praksis bertingkah laku, seperti yang pernah dilakukan melalui TAP MPR Nomor II tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Bila kita menghadapi Pancasila dalam perilaku praksis, maka *luka lama akan berdarah kembali.*

TANTANGAN IDEOLOGI PANCASILA

Eksistensi Ideologi Pancasila dewasa ini tengah dihadapkan kepada dua tantangan besar. *Dinamika internal* dan *dominasi eksternal*. Dinamika internal dimaksudkan adalah tantangan yang bersumber dari pemikiran dan kepentingan pendukung ideologi itu sendiri. Karena adanya kemajuan dan perubahan dalam masyarakat sehingga menimbulkan aspirasi baru yang dapat memperkuat atau melemahkan ideologi itu. Bila ideologi tidak cepat digunakan untuk mereduksi pemikiran yang melemahkannya, maka tercipta distorsi antara ideologi dengan realitas hidup pendukungnya.

Pemberlakuan otonomi daerah yang secara signifikan mendorong kemajuan pada daerah sesungguhnya menimbulkan berbagai aspirasi masyarakat di daerah yang bersangkutan untuk memajukan daerahnya. Dengan berbagai upaya, bagaikan perlombaan untuk mencari cara cepat-tepat meraih kemajuan. Namun, ekses sosial dari pembangunan itu terkadang menghacurkan nilai-nilai kemasyarakatan yang selama ini dipertahankan.

Hasrat untuk membangun daerah hendaknya tidak diartikan sektoral atau terpisah dari pembangunan aspek kehidupan kebangsaan secara keseluruhan. Aspirasi dan kepentingan lokal, daerah, atau suatu bidang hendaknya didasari atau dijiwai oleh penerapan ideologi nasional. Kepedulian akan aspirasi dan kepentingan sektoral justru dapat menghancurkan nilai-nilai pendukung suatu ideologi Pancasila. Meskipun keberdaaan nilai-nilai pendukung itu tidak langsung menghancurkan nilai-nilai yang fundamental, namun secara perlahan akan berakibat membuat nilai mendasar kehilangan makna. Sehingga akan menempatkan suatu ideologi dalam suatu slogan, tanpa arti.

Sedangkan dominasi eksternal adalah tantangan yang bersumber dari pengaruh luar yang dinilai lebih menguntungkan sepihak dan dalam jangka pendek, terutama yang bersifat hedonisme. Desakan eksternal ini disebabkan adanya ketergantungan kita terhadap modal, ilmu pengetahuan & teknologi, serta budaya (Sutja, 2007). Penerimaan modal (pinjaman) sering kali mempersyaratkan perubahan akan kebijakan yang sejatinya dianggap sebagai suatu yang mewujudkan cita-cita bernegara. Kemajuan IPTEK yang luar telah memperlancar mobilisasi dan aliran informasi dan mengaburkan batas demarkasi teritorial suatu negara. Sehingga paham, ajaran, atau gagasan yang tidak sesuai dengan Pancasila sulit dibendung. Begitu juga dengan seni dan budaya, kontak budaya akan menimbulkan salah satu dari budaya akan mendominasi budaya lain tanpa batas teritorial negara.

Dominasi eksternal ini amat terasa bagi kita dewasa ini, kehidupan sosial bangsa sudah bergeser dan berubah orientasi menjadi pragmatis, materialis, dan hedonisme. Nilai keagamaan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah serta keadilan tidak lagi utuh menjadi landasan tatanan kehidupan masyarakat kita. Orientasi nilai kemasyarakatan lebih didominasi oleh negara maju/barat tanpa melakukan seleksi terhadap ketepatannya dengan kondisi kita.

Dewasa ini kulminasi kedua tantangan itu telah membuat kecemasan yang mendalam bagi semua pihak, nilai-nilai

kebangsaan kita sudah luntur dan tengah menghadapi bangsa ini kepada kondisi yang tak menentu. Prilaku praksis yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan muncul dominan, misalkan penipuan marak dimana-mana, masyarakat egois dan mementingkan diri sendiri, tidak sportif atau suka cari kambing hitam, tidak berani mengambil resiko, malas dan etos kerja rendah, kurang akuntabel tapi justru minta dilayani, ceroboh atau asal jadi, tidak disiplin dan suka diberi hak preogratif, kurang percaya diri dan dendam, irrasional, pengecut tapi anarkis bila bersama. Akibatnya korupsi, kolusi, nepotisme, edonisme (mencari kepuasan diri) gontok-gontokkan, tawuran serta pergaulan bebas sudah menjadi pengalaman biasa dalam kehidupan kita.

Karena dominasi eksternal tak mungkin terbendung serta dinamika internal perlu terwadahi, maka menuntut bangsa ini untuk menerima berbagai nilai baru, namun keterbukaan tersebut hendaknya bisa menseleksi dengan menerima nilai yang positif dan menolak nilai yang tidak sesuai.

PARADIGMA PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA

Karena seringkali kesalahan diketahui setelah dampak negatifnya dirasakan, maka hendaknya ideologi ditempatkan sebagai pemandu perilaku bangsa dalam bertindak. Baik dalam kehidupan kenegaraan maupun dalam kehidupan sosial sehari-hari. Ideologi bagi suatu Negara adalah ibarat kepribadian bagi manusia. Dengan ideologi itu suatu bangsa dapat dibedakan dengan bangsa lainnya. Oleh sebab itu kita perlu meletakkan Pancasila sebagai acuan dalam character building. Arinya, setiap warga Negara dapat dibedakan dengan bangsa lainnya karena terlihat dari perilakunya yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Sehubungan dengan pengalaman ini, ada dua bentuk atau cara pengamalan Ideologi Pancasila, yaitu *pengalaman pancasila secara objektif dan pengamalan secara subjektif*. Pengamalan secara objektif menuntut bahwa pengamalan Pancasila dalam lembaga Negara, mulai dari lembaga tertinggi (MPR) lembaga tinggi (DPR PRESIDEN BPK MA MK KY) maupun organisasi /institusi DEPARTEMEN dan lembaga kenegaraan lainnya, termasuk

pemerintahan daerah Gubernur, Bupati, Walikota, PPRD dan Dinas/Jawatan. Sementara pengalaman Pancasila secara subjektif, yakni pengamalan Pancasila oleh setiap warganegara dalam kehidupan pribadi, terhadap diri sendiri keluarga, dunia kerja, sosial kemasyarakatan serta kehidupan religi.

Untuk pengamalan secara objektif, nilai-nilai Pancasila hendaknya menjadi pradigma bagi setiap lembaga melaksanakan fungsinya. Budaya institusi dan kebijakan yang dijalankannya dilandasi oleh Pancasila. Ini tidak saja tertuju kepada lembaga Negara eksekutif, tetapi juga pada legislatif dan yudikatif. Tidak hanya terbatas dalam bidang politik, tetapi hendaknya menjadi acuan atau pradigma dalam pembangunan ekonomi, hukum, sosial, kesehatan, pendidikan, dan termasuk seni dan budaya. Dalam hal ini, kehadiran Mahkamah Konstitusi sangat memungkinkan melaksanakan penilaian dan pengawasan setiap aturan dan kebijakan pada lembaga negara.

Kegagalan dalam mengamalkan Pancasila secara objektif seringkali disebabkan oleh karena orientasi dalam pengembangan berbagai sektor pembangunan mengadopsi pola-pola barat, yang pada hakekatnya memiliki orientasi yang berbeda dengan nilai fundamental yang kita anut. Ekonomi yang cenderung liberalis telah memupuskan sistem kekeluargaan, hukum yang tidak bersifat tegas (minimalis) membuat masyarakat buta hukum dan tidak merasakan keadilan. Pendidikan yang mulai mengacu kepada kapitalisme ilmu pengetahuan, telah menuntut mahalnya biaya pendidikan (khususnya perguruan tinggi).

Sedangkan dalam pengamalan subjektif, yang menjadi ukurannya adalah kepribadian dan perilaku setiap warga Negara, tidak tekecuali usia, jenis kelamin, suku bangsa dan agamanya. Pengamalan Pancasila secara subjektif inilah letak pentingnya ideologi pancasila itu dalam kerangka character building. Namun pengamalan subjektif ini sesungguhnya tidak ditafsirkan bahwa nilai fundamental pancasila langsung dirujuk sebagai acuan perilaku. Menempatkan ideologi Pancasila sebagai rujukan perilaku praksis justru akan menimbulkan perbedaan dalam memaknai suatu nilai. Seperti dikemukakan di

atas, karena ideologi adalah suatu wawasan, konsep atau pandangan yang bersifat fundamental, bukan acuan praksis bertingkah laku, maka diperlukan penguatan terhadap tatanan sosial yang berfungsi sebagai peyangga nilai-nilai tersebut. Sehingga setiap setting kehidupan tatanan sosial itulah yang terdepan menjadi penyangga nilai Pancasila.

STRATEGI PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA

Pembangunan karakter bangsa pada hakekatnya telah berlangsung seusia bangsa ini. Sejak kita mengembangkan pendidikan nasional, semenjak itu pula pelajaran civics dimasukkan dalam kurikulum. Bahkan telah beberapa kali berganti nama dan sekarang dinamai PKn (Pendidikan Kewarganegaraan). Apapun nama dari mata pelajaran ini adalah bertujuan untuk membentuk karakter bangsa berdasarkan ideologi negara Pancasila. Jadi, pembangunan karakter bangsa melalui jalur pendidikan formal.

Namun keberhasilan dari PKn ini tidak hanya ditentukan oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Pelaksanaan nilai-nilai ideologi Pancasila pada berbagai institusi dan masyarakat sangat menentukan PKn tersebut. Oleh sebab itu, pembangunan karakter bangsa perlu dilaksanakan secara terpadu, baik dalam institusi pemerintah, swasta, maupun secara perorangan, dengan cara:

Pertama; Menempatkan nilai Pancasila sebagai bagian dari tatanan setiap institusi formal dan sosial, serta menjadi paradigma dalam pembangunan berbagai bidang kehidupan diharapkan institusi itu dijadikan contoh atau tauladan dalam pengamalan Pancasila secara objektif, sebab keberhasilan dalam pengamalan secara objektif ini akan memperkuat pengamalan Pancasila secara subjektif oleh setiap warga negara. Akan tetapi kegagalan mewujudkan pengamalan objektif justru akan mereduksi kebenaran nilai ideologi Pancasila.

Kedua; Bagi generasi muda, di samping memberikan mata pelajaran perlu dilakukan penguatan yang memadai dengan mengembangkan dan memperkuat mata pelajaran pendukung

lainnya, seperti pendidikan agama, sejarah, serta pendidikan budi pekerti.

Ketiga: Kecuali hal tersebut, hal yang tidak kalah pentingnya dalam pembangunan karakter bangsa adalah pembudayaan untuk menghormati simbol-simbol kenegaraan. Mulai dari lagu kebangsaan, Lambang Negara Garuda Pancasila, Bendera, Bahasa, UUD, penghormatan kepada Kepala Negara dan pemimpin Lembaga Negara

Untuk penerapan pengembangan karakter bangsa dalam berbagai bidang ini perlu disesuaikan dengan sifat dan kondisi masing-masing institusi.

INTEGRASI PENDIDIKAN *CHARACTER BUILDING* DALAM PENDIDIKAN

Pendidikan pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengembangkan kehidupan manusia menjadi lebih baik, karena itu ada 4 sasaran yang dijadikan prioritas dalam usaha pendidikan, yaitu;

1. pendidikan adalah proses transformasi budaya,
2. pendidikan adalah proses pembentukan pribadi,
3. pendidikan adalah proses penyiapan tenaga kerja, dan
4. pendidikan adalah proses pembentuk warga negara.

Keempat sasaran ini bukanlah berdiri sendiri dan harus dibebankan kepada mata pelajaran tertentu, tetapi merupakan suatu itegrasi keseluruhan sistem dari pendidikan. Artinya setiap pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, terutama sekali para pendidik dituntut untuk mampu menampilkan nilai-nilai kebangsaan pada setiap proses pembelajarannya. Baik menyangkut materi atau startegi pembelajarannya.

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara telah diterima oleh segenap bangsa Indonesia dan telah terbukti mampu mengatasi krisis yang dialami negara sehingga tidak perlu

- dipersoalkan lagi. Yang perlu dikembangkan adalah bagaimana ideologi Pancasila itu ditempatkan dan diimplementasikan dalam membangun dan mempertahankan bangsa ini di tengah tututan perubahan; globalisasi dan otonomi daerah.
2. Ideologi digunakan untuk menunjukkan paham kolektif kenegaraan yang berisi wawasan, pandangan hidup, tentang kenegaraan. mengandung nilai-nilai kebenaran normatif, subjektif, dan kolektif dan menuntut pendukungnya untuk melakukan tindakan tertentu.
 3. Ideologi yang kuat pada suatu negara akan menimbulkan, kepercayaan rakyat akan pemimpin dan institusi, masyarakat saling menghormati, mengurangi konflik inters antar kelompok, lokal dan sektoral, serta memberi peluang berkembangnya nilai budaya nasional
 4. Dinamika internal dan dominasi eksternal adalah dua bentuk tantangan yang tengah dihadapi oleh Ideologi Pancasila, sehingga menuntut Pancasila ditempat sebagai ideologi terbuka yang secara selektif menerima nilai baru yang relevan dengan kelima silanya.
 5. Ideologi Pancasila hendaknya diterapkan sebagai paradigma dalam pengamalan objektif dan pengamalan subjektif, hendaknya dihindari penempatan Pancasila sebagai acuan perilaku praksis.
 6. Dalam pembangunan karakter bangsa maka penguatan pendidikan formal, penerapan nilai Pancasila dalam berbagai lembaga serta penghormatan terhadap simbol kenegaraan adalah strategi yang sangat memungkinkan untuk dilaksanakan.

REFERENSI

- Indonesia yang Heterogen. Berita Dephan.
postmaster@dephan.go.id: hal 1
- Oesman, Oetoyo. 1991. Pancasila Sebagai Idiologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Jakarta : BP-7 Pusat.

- Sutja, Akmal. 2007. Pendidikan Budi Pekerti Jlid I II dan III. Jakarta: Intermasa.
- Sudrajat, 2009. Pancasila adalah Idologi Negara yang Paling Tepat untuk Bangsa
- Touraine. 1977. The Self Production of Society: Chicago: The University of Chcago Press.

URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAN DALAM MEMBANGUN KARAKTER KEBANGSAAN PESERTA DIDIK

Sudirman
STKIP Abdi Pendidikan

ABSTRACT

The nation's character consists of values that unite and integrate the whole nation. The problems of the nation's character are now under the spotlight of the various elements in the idealist society. Indonesia's national character is the values manifested in every citizen or the norms of kindness that have become the personality of Indonesian people based on Pancasila values, The Constitution of the Republic of Indonesia 1945, the Bhinneka Tunggal Ika reflected in the attitudes and behavior of every citizen in prioritizing the unity of Indonesia and territorial solidity in the daily life without undermining the importance of respecting other nations and states. Civic education plays an important role as a vehicle for improving the ability, nature, and character of democratic and responsible citizen. Regarding the problems of the implementation of Civic Education today, the new objective of Civic Education needs to be developed and deployed in national standard, material standard and effective learning models in fulfilling the goals. In accomplishing Civic Education as part of national character education that includes moral values, ethics, norms, democracy, nationalism, and general principles of Pancasila, teachers of Civic Education should conduct: 1) comprehensive approach in content, method, and all process of learning. The content of Civic Education should include all problems from the choices of personal values to general ethical values; 2) comprehend fully the concepts and indicators of character to be internalized by students in order to create syllabus and learning plan in order to conduct effective learning process; 3) create better environment to develop the students' character.

Key words: *civic education, nation's character, students*

PENDAHULUAN

Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Secara psikologis dan sosio-kultural, pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Istilah karakter juga dihubungkan dan dipertukarkan dengan istilah etika, akhlak, dan atau nilai dan berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi "positif" bukan netral. Sedangkan karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Dengan demikian karakter adalah nilai-nilai yang unik-baik yang terpatери dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Karakter secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olahraga seseorang atau sekelompok orang.

Menurut Gede Raka dkk. (2011) karakter baik dimanifestasikan dalam kebiasaan baik di kehidupan sehari-hari: pikiran baik, hati baik dan tingkah laku baik. Berkarakter baik berarti mengetahui yang baik, mencintai kebaikan dan melakukan yang baik. Selanjutnya dikatakan bahwa karakter bersifat memancar dari dalam keluar (*inside-out*), artinya kebiasaan baik tersebut dilakukan bukan atas permintaan atau tekanan dari orang lain melainkan atas kesadaran dan kemauan sendiri. Jadi karakter adalah apa yang dilakukan seseorang ketika tidak seorangpun melihat dan merperhatikannya.

Karakter menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus, dapatlah dikatakan orang tersebut memanisfestasikan perilaku buruk. Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku jujur, bertanggung jawab, suka menolong, tentulah orang tersebut memanisfestasikan karakter mulia. Istiah karakter juga erat kaitannya dengan '*personality*'. Seseorang baru bisa disebut "orang yang berkarakter" (*a person of character*) apabila tingkah

lakunya sesuai dengan kaidah moral. Dengan demikian, pendidikan karakter yang baik, harus melibatkan bukan saja aspek "pengetahuan yang baik" (*moral knowing*), tetapi juga "merasakan dengan baik" atau "*loving the good*" (*moral feeling*) dan "perilaku yang baik" (*moral action*). Penekanan aspek-aspek tersebut, diperlukan agar siswa mampu memahami, merasakan dan mengerjakan sekaligus nilai-nilai kebajikan, tanpa harus didoktrin apalagi diperintah secara paksa. Karakter juga sering diasosiasikan dengan istilah apa yang disebut dengan temperamen yang lebih memberi penekanan pada definisi psikososial yang dihubungkan dengan pendidikan dan konteks lingkungan. Sedangkan karakter dilihat dari sudut pandang behaviorial lebih menekankan pada unsur somatopsikis yang dimiliki seseorang sejak lahir.

Persoalan karakter bangsa kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Sorotan itu mengenai berbagai aspek kehidupan, tertuang dalam berbagai tulisan di media cetak, wawancara, dialog, dan gelar wicara di media elektronik. Selain di media massa, para pemuka masyarakat, para ahli, dan para pengamat pendidikan, dan pengamat sosial berbicara mengenai persoalan karakter bangsa di berbagai forum seminar, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Realitas yang tergambar semakin jauh dari apa yang dicita-citakan para pendiri negara tersebut. Bahkan kini kita dihadapkan pada semakin lunturnya nasionalisme bangsa, lemahnya penegakan hukum, korupsi yang semakin merebak dengan wajah baru, kolusi dan nepotisme dengan wajah demokrasi, primordialisme, etika politik kalangan elit kita terutama para penyelenggara negara dewasa ini sangat mengecewakan rakyat (dirangkum dari berbagai tulisan dan berita di media cetak).

Fakta menunjukkan rasa kebangsaan atau nasionalisme pada masyarakat Indonesia saat ini menunjukkan indikasi yang semakin pudar. Sebagaimana yang diungkapkan dari hasil *polling* yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung secara *online* pada tahun 2011 yang lalu, yang menyatakan bahwa 60,2 % rasa nasionalisme masyarakat rendah, 14,1 % tergolong sedang, 25,7 % tergolong tinggi. Walaupun

masyarakat secara umum belum merupakan representasi siswa SMA, namun sinyal ini cukup memprihatinkan kita sebagai anak bangsa.

Bagi kalangan pelajar, perilaku melecehkan etika, moral dan hukum dari yang ringan sampai yang berat juga sering diperlihatkan. Sebagai pendidik peneliti sering mengamati kebiasaan 'mencontek' pada saat ulangan atau ujian yang dilakukan siswa. Keinginan lulus dengan cara mudah dan tanpa kerja keras pada saat ujian nasional menyebabkan mereka berusaha mencari jawaban dengan cara tidak beretika. Mereka mencari 'bocoran jawaban' dari berbagai sumber yang tidak jelas. Apalagi jika keinginan lulus dengan mudah ini bersifat institusional karena direayasa atau dikondisikan oleh pimpinan sekolah dan guru secara sistemik. Pada mereka yang tidak lulus, ada di antaranya yang melakukan tindakan nekat dengan menyakiti diri atau bahkan bunuh diri. Perilaku tidak beretika juga ditunjukkan oleh mahasiswa. Plagiarisme atau penjiplakan karya ilmiah di kalangan mahasiswa juga masih bersifat masif. Semuanya ini menunjukkan kerapuhan karakter di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Hal lain yang menggejala di kalangan pelajar justru berbentuk 'kenakalan'. Beberapa di antaranya adalah tawuran antar pelajar. Di beberapa kota besar tawuran pelajar menjadi tradisi dan membentuk pola yang tetap, sehingga di antara mereka membentuk 'musuh bebuyutan'. Bentuk kenakalan lain yang dilakukan pelajar dan mahasiswa adalah meminum minuman keras, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan narkoba yang bisa mengakibatkan depresi bahkan terkena HIV/AIDS., maraknya 'gang pelajar' dan 'gang motor'. Perilaku mereka seringkali menjurus pada tindak kekerasan (*bullying*) yang meresahkan masyarakat dan bahkan tindakan kriminal seperti pemalakan, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Semua perilaku negatif di kalangan pelajar dan mahasiswa tersebut atas, jelas menunjukkan kerapuhan karakter yang cukup parah yang salah satunya disebabkan belum optimalnya pengembangan karakter di lembaga pendidikan di samping karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung.

Fenomena di atas tentu masih kontra-produktif dengan apa yang sudah diamanatkan UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berkaitan dengan melunturnya rasa nasionalisme, pada tataran empirik di lapangan dapat dilihat secara kasat mata, beberapa gejala yang ada dan berkembang dalam masyarakat, antara lain: a) Menurunnya kadar solidaritas sosial nasional, sebagai nilai dasar integrasi nasional ditandai dengan banyaknya konflik sosial horizontal yang begitu mudahnya terpicu oleh hal-hal yang sepele berupa sentimen-sentimen kelompok/golongan atau daerah. b) Rendahnya penghormatan terhadap nilai-nilai pluralisme, yang seharusnya menjadi aset yang menguatkan bangsa. Hal ini dapat dilihat dari mudahnya suatu kelompok/golongan primordial masyarakat yang mendiskreditkan keberadaan kelompok/golongan lain hanya karena perbedaan-perbedaan asal-usul atau keyakinannya. Pandangan *stereotype* masih banyak digunakan didalam menilai hubungan antar individu ataupun kelompok. c) Rendahnya pemahaman akan makna simbol-simbol kenegaraan, ditandai dengan penggunaan simbol/lambang yang semestinya menyiratkan persatuan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kebersamaan, justru digunakan sebagai alat pembenaran terhadap tindakan destruktif yang justru sangat menciderai nilai-nilai persatuan dan kebersamaan itu sendiri.

Pada hal dalam perkembangan global yang semakin kompetitif sangat diperlukan sumber daya manusia dalam jumlah, mutu dan karakter yang memadai sebagai pendukung utama dalam pembangunan. Untuk memenuhi sumber daya manusia tersebut, pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap.

Rumusan fungsi pendidikan tersebut berkaitan dengan pembentukan karakter siswa sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun dan berinteraksi dengan masyarakat. Berdasarkan penelitian di Harvard University Amerika Serikat (Ginanjari, 2010), ternyata kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (*hard skill*) saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (*soft skill*). Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20 persen oleh *hard skill* dan sisanya 80 persen oleh *soft skill*. Bahkan orang-orang tersukses di dunia bisa berhasil dikarenakan lebih banyak didukung kemampuan *soft skill* daripada *hard skill*. Hal ini mengisyaratkan bahwa mutu pendidikan karakter siswa sangat penting untuk ditingkatkan.

Menjawab hal di atas, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memandang perlunya pembangunan karakter saat ini. Pada peringatan Dharma Shanti Hari Nyepi 2010, Presiden menyatakan, "Pembangunan karakter (*character building*) amat penting. Kita ingin membangun manusia Indonesia yang berakhlak, berbudi pekerti, dan mulia. Bangsa kita ingin pula memiliki peradaban yang unggul dan mulia. Peradaban demikian dapat kita capai apabila masyarakat kita juga merupakan masyarakat yang baik (*good society*). Dan, masyarakat idaman seperti ini dapat kita wujudkan manakala manusia-manusia Indonesia merupakan manusia yang berakhlak baik, manusia yang bermoral, dan beretika baik, serta manusia yang bertutur dan berperilaku baik pula."

Melanjutkan program pendahulunya, hal yang sama juga menjadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang dikenal dengan program dan semboyan revolusi mentalnya. Terminologi "revolusi", kata Jokowi, tidak selalu berarti perang melawan penjajah. Menurut dia, kata revolusi merupakan refleksi tajam bahwa karakter bangsa harus dikembalikan pada

aslinya. "Kalau ada kerusakan di nilai kedisiplinan, ya mesti ada serangan nilai-nilai ke arah itu. Bisa mengubah pola pikir, mindset. Titik itulah yang kita serang," ujar Jokowi. Satu-satunya jalan untuk revolusi sebagaimana yang dia maksudkan itu, kata Jokowi, adalah lewat pendidikan yang berkualitas dan merata, serta penegakan hukum yang tanpa pandang bulu. "Kita harus mengembalikan karakter warga negara ke apa yang menjadi keaslian kita, orisinalitas kita, identitas kita," tegas Jokowi. Dia berkeyakinan, dengan komitmen pemerintah yang kuat disertai kesadaran seluruh warga negara, Indonesia dapat berubah ke arah yang lebih baik. Revolusi mental utamanya dilakukan melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan berbudi pekerti luhur, Pendidikan demokrasi dan sadar hukum.

Telaah mengenai karakter hampir selalu dikaitkan dengan konsep kebaikan yang merupakan karakteristik utama pada manusia dan masyarakat yang sangat dihargai oleh para filsuf dan rohaniawan dari berbagai agama. Konsep tentang kebajikan dan karakter bisa ditemukan dalam berbagai budaya dan agama di dunia. Ada berbagai klasifikasi mengenai kebajikan dan karakter. Salah satu yang sangat komprehensif adalah seperti yang dikemukakan oleh Paterson & Seligman yang mengidentifikasi berbagai kebajikan yang di dalamnya terdapat beberapa kekuatan karakter yang bisa ditemukan dalam semua budaya dan agama-agama besar di dunia, yang dikategorikan atas enam kategori, yaitu; *Pertama*: kearifan dan pengetahuan (*Wisdom and knowledge*) dimana karakter didalamnya adalah kreativitas, rasa ingin tahu, berpikiran terbuka (kritis, cermat), semangat belajar, wawasan. *Kedua*: keberanian (*courage*) dimana karakter didalamnya adalah berani, gigih, integritas (tulus, jujur), vitalitas. *Ketiga*: kemanusiaan (*humanity*) dimana nilai karakter didalamnya adalah kasih dan peduli, kebaikan hati, kecerdasan social. *Keempat*: keadilan (*justice*), dimana nilai karakter didalamnya adalah kewargaan (tanggung jawab social, loyalitas, kerja-sama). *Kelima*: pembatasan diri (*temperance*), dimana nilai karakter didalamnya adalah pemaaf, rendah hati (kesederhanaan), kehati-hatian dan pengendalian diri. *Keenam*: transendensi (*trancedency*), nilai karakter didalamnya adalah apresiasi pada keindahan, rasa

syukur, harapan (optimis, orientasi masa depan), humor, dan spritualitas (Gede Raka dkk. 2011).

Kemendiknas (2010) dalam desain induk pendidikan karakter menjelaskan bahwa perilaku berkarakter secara psikologis merupakan perwujudan dari potensi *Intellegence Quotient* (IQ), *Emotional Quotient* (EQ), *Spritual Quotient* (SQ) dan *Adverse Quotient* (AQ) yang dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya dijelaskan bahwa seseorang yang berkarakter menurut pandangan agama pada dirinya terkandung potensi-potensi, yaitu: *sidiq, amanah, fathonah, dan tablig*. Berkarakter menurut teori pendidikan apabila seseorang memiliki potensi kognitif, afektif, dan psikomotor yang teraktualisasi dalam kehidupannya. Adapun menurut teori sosial, seseorang yang berkarakter mempunyai logika dan rasa dalam menjalin hubungan intra personal, dan hubungan interpersonal dalam kehidupan bermasyarakat. Perilaku seseorang yang berkarakter pada hakekatnya merupakan perwujudan fungsi totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dan fungsi totalitas sosial kultural dalam konteks interaksi (dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat.

Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dapat dikelompokkan dalam: Olah Hati (*Spiritual and emotional development*), Olah Pikir (*intellectual development*), Olah Raga dan Kinestetik (*physical and kinesthetic development*), dan Olah Rasa dan Karsa (*affective and creativity development*) (Kemendiknas. 2010). Keempat proses psikososial (olah hati, olah pikir, olah raga, dan olahrasa dan karsa) tersebut secara holistik dan koheren memiliki saling keterkaitan dan saling melengkapi, yang bermuara pada pembentukan karakter yang menjadi perwujudan dari nilai-nilai luhur.

Karakter bangsa merupakan suatu pandangan, sikap dan tindakan masyarakat yang mengedepankan rasa ke-Indonesiaan yang dicirikan dengan rasa nasionalisme dan kebangsaan dalam bingkai kebhinekaan dan kesatuan. Di dalam karakter bangsa terletak sikap dan tindakan yang menggambarkan tentang rasa

cinta yang sedemikian menggelora tentang nasionalis dan kebangsaan dalam koridor kesatuan dan kebhinnekaan (Prof. Dr. Nur Syam, M.Si (My Official Site) <http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/> diakses tanggal 30 September 2011).

Karakter kebangsaan berisi nilai-nilai yang menyebabkan utuh dan bersatunya bangsa. Nilai tersebut berkembang dari rasa peduli terhadap bangsanya, merasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bangsanya, bangga terhadap bangsanya, setia dan cinta terhadap bangsanya, yang bermuara pada siap berkorban demi bangsanya. Dengan bersendi pada nilai-nilai tersebut warga bangsa tidak rela bila bangsanya dicela dan dihujat apalagi dipermalukan (Kemendiknas. 2010). Berdasarkan konsep di atas maka karakter kebangsaan adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas-baik yang tecermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok orang mengandung nilai-nilai yang menyebabkan utuh dan bersatunya bangsa.

Karakter kebangsaan Indonesia adalah nilai yang melekat pada diri setiap warga negara atau norma-norma kebaikan yang terkandung dan menjadi ciri/watak/ kepribadian bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dicerminkan dari sikap dan perilaku setiap warga negara sebagai bangsa Indonesia yang senantiasa mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tanpa mengenyampingkan tanggung jawab untuk menghargai bangsa dan negara lain. Jadi karakter bangsa Indonesia adalah karakter yang dimiliki warga negara/bangsa Indonesia berdasarkan tindakan-tindakan yang dinilai sebagai suatu kebajikan berdasarkan nilai yang berlaku di masyarakat dan bangsa Indonesia (Kemendiknas. 2010). Karakter bangsa Indonesia ditampilkan oleh jati diri bangsa Indonesia, atau dengan kata lain karakter bangsa akan ditampilkan sebagai nilai-nilai luhur yang digali

dari khasanah ibu pertiwi dan mencerminkan tata nilai kehidupan nyata anak bangsa oleh *founding fathers* dan dirumuskan dalam suatu tata nilai yang kita kenal dengan Pancasila (Sudarsono. 2011).

Berdasarkan keempat sumber nilai itu, teridentifikasi ada 18 nilai karakter bangsa (Kemendiknas 2010) yaitu: 1). Religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 2). Jujur; perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam sikap, perkataan, prilaku, tindakan, dan pekerjaan. 3). Toleransi; sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 4). Disiplin; tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku. 5). Kerja keras dan perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas-tugas, serta menyelesaikan hal tersebut dengan sebaik-baiknya. 6). Kreatif dalam berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 7). Mandiri; sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 8). Demokratis; cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 9). Rasa ingin tahu; sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 10). Semangat kebangsaan; cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 11). Cinta tanah air; cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 12). Menghargai prestasi; sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. 13).

Bersahabat/komunikatif; tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 14). Cinta damai; sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 15). Gemar membaca; kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 16). Peduli lingkungan; sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 17). Peduli sosial; sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 18). Tanggung jawab; sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

URGENSI PKN DALAM MEMBANGUN KARAKTER KEBANGSAAN PESERTA DIDIK

Berdasarkan *grand design* yang dikembangkan, secara psikologis dan sosial kultural pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dapat dikelompokkan dalam: olah hati (*spiritual and emotional development*), olah pikir (*intellectual development*), olah raga dan kinestetik (*physical and kinesthetic development*), dan olah rasa dan karsa (*affective and creativity development*) (Kemendiknas, 2010).

Membangun karakter kebangsaan Indonesia bagi peserta didik haruslah dengan cara mendidik perasaan dan pikiran orang-orang untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan ke dalam perilaku sehari-hari. Hal termudah adalah dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila ke dalam perilaku sehari-hari. Maka oleh sebab itu untuk membangun dan

mengembangkan karakter termasuk karakter kebangsaan sebaiknya lebih menitik-beratkan pada pendekatan belajar humanisme dengan tidak mengabaikan pendekatan konstruktivisme. Pembelajaran berdasarkan teori humanisme ini cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa bergairah, berinisiatif dalam belajar dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku dan sikap atas kemauan sendiri. Dalam teori humanisme memandang bahwa belajar bukan sekedar pengembangan kualitas kognitif saja, melainkan juga sebuah proses yang terjadi dalam diri individu yang melibatkan seluruh aspek yang ada. Aspek tersebut meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu dari lima tradisi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yakni *citizenship tranmission*, saat ini sudah berkembang menjadi tiga aspek pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship education*), yakni aspek akademis, aspek kurikuler, dan aspek sosial budaya. Secara akademis pendidikan kewarganegaraan dapat didefinisikan sebagai suatu bidang kajian yang memusatkan telaaahnya pada seluruh dimensi psikologis dan sosial budaya kewarganegaraan individu, dengan menggunakan ilmu politik, ilmu pendidikan sebagai landasan kajiannya atau penemuannya intinya yang diperkaya dengan disiplin ilmu lain yang relevan, dan mempunyai implikasi kebermanfaatn terhadap instrumentasi dan praksis pendidikan setiap warga negara dalam konteks sistem pendidikan nasional (Wiranaputra, 2004).

Kajian keilmuan PKn, program kurikuler PKn, dan aktivitas sosial-kultural PKn yang tercakup di dalamnya memberi ciri multifasetisitas atau multidimensionalitas. Sifat multidimensionalitas inilah yang membuat PKn dapat disikapi sebagai pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan kebangsaan, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak azasi manusia, dan pendidikan demokrasi. Hal itu tergantung dari aspek ontologi mana kita berangkat, dengan metode kerja epistemologi mana

pengetahuan itu dibangun, dan untuk arah tujuan aksiologis mana kegiatan itu akan membawa implikasi. Fungsi PKn adalah wahana untuk membentuk warga negara cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 (Direktorat P-SMP).

Menurut Malik Fajar (2004) bahwa PKn sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak dan karakter warganegara yang demokratis dan bertanggungjawab, PKn memiliki peranan yang amat penting. Mengingat banyak permasalahan mengenai pelaksanaan PKn sampai saat ini, maka arah baru PKn perlu segera dikembangkan dan dituangkan dalam bentuk standar nasional, standar materi serta model-model pembelajaran yang efektif dalam mencapai tujuannya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai arah baru yaitu: *Pertama*, PKn merupakan bidang kajian kewarganegaraan yang ditopang berbagai disiplin ilmu yang relevan, yaitu: ilmu politik, hukum, sosiologi, antropologi, psikologi, dan disiplin ilmu lainnya, yang digunakan sebagai landasan untuk melakukan kajian-kajian terhadap proses pengembangan konsep, nilai, dan perilaku demokrasi warganegara. Kemampuan dasar terkait dengan kemampuan intelektual, sosial (berpikir, bersikap, bertindak, serta berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat). Substansi pendidikan (cita-cita, nilai, dan konsep demokrasi) dijadikan materi kurikulum PKn yang bersumber pada pilar-pilar demokrasi konstitusional Indonesia. *Kedua*, PKn mengembangkan daya nalar (*state of mind*) bagi para siswa. Pembangunan karakter bangsa merupakan proses pengembangan warga negara yang cerdas dan berdaya nalar tinggi. PKn memusatkan perhatiannya pada pengembangan kecerdasan (*civic intelligence*), tanggung jawab (*civic responsibility*), dan partisipasi (*civic participation*) warga negara sebagai landasan pengembangan nilai dan perilaku demokrasi. *Ketiga*, PKn sebagai suatu proses pencerdasan, maka pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah yang lebih inspiratif dan partisipatif dengan menekankan pada pelatihan penggunaan logika dan penalaran. Untuk

memfasilitasi pembelajaran PKn yang efektif dikembangkan bahan belajar interaktif yang dikemas dalam berbagai bentuk paket seperti bahan belajar tercetak, terekam, tersiar, elektronik, dan bahan belajar yang digali dari lingkungan masyarakat sebagai pengalaman langsung. Upaya peningkatan kualifikasi dan mutu guru PKn perlu dilakukan secara sistematis agar terjadinya kesinambungan antara pendidikan guru melalui LPTK, pelatihan dalam jabatan, serta pembinaan kemampuan profesional guru secara berkelanjutan dalam mengelola proses pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang diharapkan. *Keempat*, kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi. Melalui PKn, pemahaman, sikap, dan perilaku demokratis dikembangkan bukan semata-mata melalui “mengajar demokrasi” (*teaching democracy*), tetapi melalui model pembelajaran yang secara langsung menerapkan cara hidup berdemokrasi (*doing democray*). Penilaian bukan semata-mata dimaksudkan sebagai alat kendali mutu tetapi juga sebagai alat untuk memberikan bantuan belajar bagi siswa sehingga dapat lebih berhasil di masa depan. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh termasuk portofolio siswa dan evaluasi diri yang lebih berbasis kelas.

Selanjutnya, menurut Malik Fajar (2004) sejak tahun 1994, pembelajaran PKn menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan. Kendala dan keterbatasan tersebut adalah: (1) masukan instrumental (*instrumental input*) terutama yang berkaitan dengan kualitas guru serta keterbatasan fasilitas dan sumber belajar, dan (2) masukan lingkungan (*instrumental input*) terutama yang berkaitan dengan kondisi dan situasi kehidupan politik negara yang kurang demokratis.

Dari arah baru PKn yang diharapkan terealisasi dalam kehidupan nyata di sekolah maupun di masyarakat, yang terbentang ke seluruh Tanah Air. Untuk itu diperlukan pemahaman bersama untuk disosialisasikan dalam bentuk kerja nyata dalam pembentukan kepribadian siswa menjadi pribadi yang utuh, dan insan kamil yang menjadi tumpuan harapan kita bersama yakni dapat menjawab tantangan pembelajaran pada abad 21, yakni: (1) berpikir kritis dan menyelesaikan masalah-masalah; (2) kreatif dan inovasi; (3) keterampilan berkomunikasi

dan menggali dan menyampaikan informasi; (4) keterampilan berkolaborasi; (5) pembelajaran kontekstual; dan (6) keterampilan menggunakan teknologi dan media komunikasi dan informasi.

Tujuan PKn adalah agar siswa memiliki kemampuan: (1) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, (2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi, (3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya, (4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (BSNP, Standar Isi).

Selanjutnya dalam naskah akademik Pendidikan Kewarganegaraan dijelaskan Tujuan PKn adalah mendidik warga negara yang baik, yakni: (1) peka terhadap informasi baru yang dijadikan pengetahuan dalam kehidupannya; (2) warga negara yang berketerampilan; (a) peka dalam menyerap informasi; (b) mengorganisasi dan menggunakan informasi; (c) membina pola hubungan interpersonal dan partisipasi sosial; (3) warga negara yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, yang disyaratkan dalam membangun suatu tatanan masyarakat yang demokratis dan beradab, maka setiap warga negara haruslah memiliki karakter atau jiwa yang demokratis yang meliputi; (a) Rasa hormat dan tanggungjawab terhadap sesama warga negara terutama dalam konteks adanya pluralitas masyarakat Indonesia; (b) Bersikap kritis terhadap kenyataan empiris (realitas sosial, budaya, dan politik) maupun terhadap kenyataan supra empiris (agama, mitologi, kepercayaan); (c) Membuka diskusi dan dialog yakni perbedaan dan pandangan serta perilaku merupakan realitas empirik yang pasti terjadi di tengah komunitas warga negara, apalagi di tengah komunitas masyarakat yang plural dan multietnik; (d) Bersikap terbuka yang merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan sesama manusia, termasuk rasa menghargai terhadap hal-hal yang mungkin asing; (e)

Rasional yaitu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional adalah sesuatu hal yang harus dilakukan; (f) Adil adalah menempatkan sesuatu secara proporsional; (g) Jujur yaitu memiliki sikap dan sifat yang jujur bagi warga negara merupakan suatu yang niscaya.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan politik yang fokus materinya berupa peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Prewitt & Dawson, dan Aziz dkk dalam Cholisin, 2004:10). Pendidikan Kewarganegaraan lebih merupakan bentuk pengajaran politik atau pendidikan politik. Sebagai pendidikan politik berarti fokusnya lebih menekankan bagaimana membina warga negara yang lebih baik (memiliki kesadaran politik dan hukum) lewat suatu proses belajar mengajar (Cholisin, 2004:11). Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak dan karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kemudian tujuan mata pelajaran Kewarganegaraan menurut Kurikulum 2004 adalah untuk memberikan kompetensi-kompetensi sebagai berikut; (1) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (2) berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara; (3) berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; (4) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Standar Kompetensi Kewarganegaraan SMA/ Aliyah Tahun 2003).

Selain itu, dari sisi teori dan implementasinya mata pelajaran PKn mempunyai peran yang sangat penting dalam pendidikan untuk mengembangkan pembangunan karakter termasuk karakter kebangsaan melalui peran guru PKn. Sesuai

dengan salah satu misi mata pelajaran PKn paradigma baru yaitu sebagai pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang perlu didukung dengan baik dan nyata, dengan pendidikan karakter yang tepat akan dihasilkan output generasi muda yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas secara lahir maupun batin.

PKn sebagai salah satu mata pelajaran yang memiliki muatan dalam pendidikan moral dan nasioalisme, merupakan sebuah mata pelajaran yang wajib mengambil bagian dalam proses pendidikan karakter melalui peran guru PKn. Dengan menerapkan metode pengajaran yang tepat dan didukung oleh semua jajaran personel dilembaga pendidikan tersebut, maka guru PKn dapat mengambil inisiatif untuk menjadi pendorong berlangsungnya program pembelajaran karakter tersebut. Sebagai output dari pembelajaran PKn ini akan diperoleh generasi yang memiliki sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Mengutip pendapat Winataputra (2005), agar paling PKn dapat benar-benar memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan karakter bangsa, tiga hal perlu kita cermati, yaitu *“curriculum content and instructional strategies; civic education classroom; and learning environment. Pertama,* dilihat dari konten kurikulum, *Kedua,* kelas PKn seyogyanya dilihat dan diperlakukan sebagai laboratorium demokrasi. Profil konseptual kelas PKn yang digagaskan di atas, harus dikembangkan untuk menggantikan kelas PKn saat ini yang bersifat lebih dominatif dan indoktrinatif. Untuk itu maka proses pembelajaran PKn perlu dikembangkan dengan menerapkan pendekatan belajar yang bersifat memberdayakan siswa/mahasiswa. Dengan demikian kelas PKn akan berubah dari yang selama ini bersifat *“dominatif”* menjadi *“integratif”*. Pendekatan pembelajaran yang disarankan untuk dikembangkan adalah yang berorientasi pada proses berpikir kritis dan pemecahan masalah atau *“critical thinking-oriented and problem solving-oriented modes”*. Dan *ketiga,* pada saat bersamaan lingkungan masyarakat sekolah dan masyarakat yang lebih luas seyogyanya, juga dikondisikan untuk menjadi *“spiral global classroom”* (CICED, 1999).

Untuk mewujudkan pendidikan PKn sebagai bagian dari pendidikan karakter kebangsaan yang mengandung moral, nilai, demokrasi serta Pancasila, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan guru PKn, yakni sebagai berikut:

1. Dalam pembelajaran PKn sebaiknya dilakukan dengan pendekatan komprehensif, baik komprehensif dalam isi, metode, maupun dalam keseluruhan proses pendidikan. Isi pendidikan PKn hendaknya meliputi semua permasalahan yang berkaitan dengan pilihan nilai pribadi sampai nilai-nilai etika yang bersifat umum. Selain itu, guru PKn juga perlu memahami dengan baik mengenai konsep dan indikator karakter yang hendak diinternalisasikan kepada peserta didik supaya guru PKn dapat membuat silabus dan RPP dengan baik sehingga dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif.
2. Metode pembelajaran PKn yang digunakan oleh guru PKn, harus mengembangkan pembelajaran aktif dengan menggunakan banyak metode belajar seperti penanaman nilai melalui studi pustaka, klarifikasi nilai melalui mengamati/mengobservasi, analisis nilai melalui pemecahan masalah/kasus, maupun diskusi kelas untuk menanamkan nilai berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif.
3. Guru PKn hendaknya menjadi model atau contoh bagi peserta didik sebagai guru yang berkarakter. Jadi dalam setiap sikap dan tindakan guru PKn harus menggambarkan karakter yang diinternalisasikan kepada peserta didiknya.
4. Untuk mewujudkan PKn sebagai bagian dari pendidikan karakter maka harus menciptakan kultur sekolah yang kondusif bagi pengembangan karakter peserta didik. Sehingga, kultur sekolah yang berupa norma-norma, nilai-nilai, sikap, harapan-harapan, dan tradisi yang ada di sekolah yang telah diwariskan dan dipegang bersama yang mempengaruhi pola pikir, sikap, dan pola tindakan seluruh warga sekolah. Karena kultur sekolah yang positif dan sehat akan berdampak pada motivasi, prestasi, produktivitas, kepuasan serta kesuksesan siswa dan guru.

Dalam mencapai tujuan ini tentunya Pendidikan PKn tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain, seperti mata pelajaran agama. Pekerjaan ini memang bukan hanya bertumpu pada mata pelajaran PKn tetapi mata pelajaran PKn akan menjadi dasar dan motor dalam setiap kegiatan dan aktivitas yang ada, dan guru PKn akan menjadi pengontrol dan pembimbing dalam pelaksanaannya. Tentu saja, untuk mewujudkan tujuan ini, guru PKn harus didukung dan dibantu oleh semua warga sekolah melalui kerjasama yang baik antara semua pihak, baik oleh kepala sekolah, guru, siswa, serta komite sekolah.

PENUTUP

Untuk mewujudkan pendidikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari pendidikan karakter kebangsaan yang mengandung moral, etik, nilai, norma, demokrasi, nasionalisme serta Pancasila secara umum, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan, yakni: 1) Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebaiknya dilakukan dengan pendekatan komprehensif, baik komprehensif dalam isi, metode, maupun dalam keseluruhan proses pendidikan. Isi pendidikan Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya meliputi semua permasalahan yang berkaitan dengan pilihan nilai pribadi sampai nilai-nilai etika yang bersifat umum. Selain itu, guru Pendidikan Kewarganegaraan juga perlu memahami dengan baik mengenai konsep dan indikator karakter yang hendak diinternalisasikan kepada siswa supaya dapat membuat silabus dan RPP dengan baik sehingga dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif. 2) Metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, harus mengembangkan pembelajaran aktif dengan menggunakan banyak metode belajar seperti penanaman nilai melalui studi pustaka, klarifikasi nilai melalui mengamati/mengobservasi, analisis nilai melalui pemecahan masalah/kasus, maupun diskusi kelas untuk menanamkan nilai berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif. 3) Guru Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya menjadi model atau contoh teladan bagi siswa sebagai guru yang berkarakter. Jadi, dalam

setiap sikap dan tindakan guru harus menggambarkan karakter termasuk karakter kebangsaan yang diinternalisasikan kepada siswanya. 4) Untuk mewujudkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari pendidikan karakter maka harus menciptakan kultur sekolah yang kondusif bagi pengembangan karakter siswa. Sehingga, kultur sekolah yang berupa norma-norma, nilai-nilai, sikap, harapan-harapan, dan tradisi yang ada di sekolah yang telah diwariskan dan dipegang bersama yang mempengaruhi pola pikir, sikap, dan pola tindakan seluruh warga sekolah.

REFERENSI

- Agustian, Ari Ginanjar. (2010). *ESQ, Emotional Spritual Quotient*". Jakarta. Arga Publishing.
- Djauharah Bawazir, (2007) "*Model Sistem Pendidikan Bunyan, Pendekatan Holistik menuju Dewasa Moral di Usia 15 Tahun*" Jakarta, BASISBN : 978-979-25-3220-3
- Fajar, Malik. (2004). "*tentang Revitalisasi Nasionalisme Indonesia Menuju Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Nation and Character Bulding*", *Semiloka Nasional Character and Nation Building*, tanggal 18 Mei 2004.
- Gede Raka dkk. (2011). "*Pendidikan Karakter di Sekolah*" Jakarta. PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia
- Kalidjernih, F.K. (2010). "*Situasionisme: Refleksi untuk Pendidikan Karakter di Indonesia*", disampaikan dalam Seminar Aktualisasi Pendidikan Karakter yang diselenggarakan oleh Program Studi PKn SPs UPI, 15 November 2010.
- Kementerian Pendidikan Nasional,(2010)."*Draf Panduan Guru Mata Pelajaran PKn: Pendidikan Karakter Terintegrasi dalam Pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama*, Jakarta. Diknas.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). "*Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa*". Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.

- Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). *“Desain Induk Pendidikan Karakter”*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). *“Pedoman Pengembangan Budaya dan Karakter Bangsa”*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Lemhanas. (2010). *Naskah Akademik Pedoman Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan*.
http://www.lemhannas.go.id/id/images/stories/dokumen/naskah_akademik_pdf.pdf
- Megawangi, Ratna. (2003). *“Pendidikan Karakter untuk Membangun Masyarakat Madani.”* IPPK Indonesia Heritage Foundation Prayitno. (2008). *“Dasar Teori dan Praksis Pendidikan”* Uneversitas Negeri Padang
- Wianataputra, U.S. (2005). *“Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Masyarakat Demokratis dan Berkeadaban: Tinjauan Filosofis-Pedagogis”*. Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Dosen Pendidikan Kewarganegaraan PTN dan PTS, Ditjen Dikti, untuk Wilayah Indonesia Barat. Hotel Dharma Deli, Medan 22 September 2005.
- Winataputra, Udin S. (2004). *“Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi Konstitusional RI”*, Semiloka Nasional tentang Revitalisasi Nasionalisme Indonesia Menuju Character and Nation Building, tanggal 18 Mei 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Blog. Prof. Dr. Nur Syam, M.Si (My Official Site)
<http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/> diakses tanggal 30 September 2011.

REDEFINISI KONSEP “KEWARGANEGARAAN” (CITIZENSHIP) DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM UPAYA MENGHADAPI TANTANGAN BANGSA

Isnarmi Moeis

Dosen Pendidikan Kewarganegaraan FIS-UNP

ABSTRACT

Various recent national problems, particularly those related to the characters of the young generation, increasingly demand serious solutions. The fast increasing number of youth’s moral problems eclipses the improvement made by formal education. Solving these problems require responsive action initiated by educators at a practical level. This action involves creative efforts that are able to interpret formal policies designed by the government, then manifest it in real and easily accomplished action. This paper, in answering the challenge, discusses the concepts of the shifting meaning of citizenship education as a foundation for developing responsive education efforts. Furthermore, the writer recommends measures by civic education expected to answer the challenge.

Key words: *citizenship, critical education, moral problems*

PENDAHULUAN

Beberapa berita yang sangat mengejutkan dapat disimak akhir-akhir ini melalui media massa. Satu di antaranya adalah perkawinan sejenis yang foto-fotonya banyak diunggah di media sosial. Peristiwa ini terjadi di Bali dan di Boyolali. Berbagai kalangan memberi tanggapan, termasuk pemuka agama di Bali, mengatakan jika itu benar berarti telah terjadi penodaan terhadap agama. Demikian juga kalangan ulama di Boyolali juga bereaksi keras dengan menyuarakan kembali tentang keharaman perkawinan sejenis. Belakangan DPR telah mengajukan usulan agar homoseksual yang dilakukan orang dewasa dijadikan delik pidana, karena selama ini hanya homoseksual terhadap anak-

anak saja yang merupakan delik pidana. Di lihat dari UU perkawinan tindakan itu merupakan pelanggaran. Ini dilihat dari kacamata hukum, yang tindak lanjutnya juga secara hukum. Jika tindakan hukum tegas, tentu gejala pergaulan yang bertentangan dengan norma itu minimal akan diperlambat laju perkembangannya di Indonesia.

Fenomena lain yang lebih memilukan adalah banyaknya kasus kekerasan oleh anak dengan sebayanya (*bullying*). Kasus-kasus ini menjadi tontonan terbuka yang diunggah melalui media sosial, oleh masyarakat dengan maksud agar diketahui oleh penegak hukum. Tontonan-tontonan tersebut hanya seperti sebuah puncak dari gunung es, yang mencerminkan lebih banyak lagi peristiwa serupa yang membawa kepada kesimpulan kita betapa telah hilangnya rasa persaudaraan bahkan kemanusiaan di kalangan generasi muda kita.

Belum lagi merebaknya paham-paham sesat seperti syiah, ahmadiyah, jaringan Islam liberal yang merupakan ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ironisnya mereka berkembang bukan dalam payung nilai Pancasila, tetapi dalam label pluralisme sebagai paham yang mengatasnamakan kesetaraan derajat dalam keragaman masyarakat.

Di sisi lain, fenomena di atas kelihatan seolah seperti peristiwa biasa terutama bagi para pelakunya dan pendukungnya baik dalam negeri juga di dunia Internasional. Mereka menganggap perilaku itu sebagai hak azasi yang harus dilindungi, dan sekaligus merupakan hak untuk berbeda di tengah keragaman masyarakat

Dari sudut pendidikan kewarganegaraan fenomena ini lebih dari peristiwa hukum atau sosial. Di dalamnya masalah-masalah kewarganegaraan (*citizenship*) dalam konteks yang lebih luas di tengah keragaman masyarakat (*multiculturalism*). Untuk menghadapi masalah-masalah ini perlu didalami lagi makna kewarganegaraan dan segala atribut yang terkait di dalamnya. Jika tidak, maka kedudukan pendidikan kewarganegaraan hanya sebatas legalitas politik dan perubahan politik dalam Negara Indonesia. Setelah 70 tahun kemerdekaan NKRI, semestinya

pendidikan kewarganegaraan menjadi sarana pendidikan yang handal untuk mempersiapkan warganegara yang baik.

Banyak hal yang perlu dilakukan untuk itu. Misalnya merekonstruksi dan mempertegas isi mata pelajaran PKn, sehingga dapat dapat menjadi solusi mengatasi masalah. Sebagaimana diketahui, isi mata pelajaran PKn sudah diberikan rambu-rambu dalam lingkup empat aspek: Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan RI, Bhinneka Tunggal. Di tataran praktis batasan konsep ini dikembangkan secara normatif, dan struktural yang ditargetkan untuk ujian (penguasaan pengetahuan). Sementara, fenomena masyarakat berkembang dengan cepat bukan hanya sebatas tren tetapi telah masuk ke dalam tataran sistem nilai dan budaya. Kita ambil contoh kasus di atas, fenomena sosial itu tumbuh dan berkembang dalam payung keragaman (*multicultural*). Sementara dalam isi PKn, konsep multikultural dipahami dan dikembangkan guru sebatas paparan kekayaan budaya yang ada, bagaimana dengan “budaya-budaya” baru yang ternyata bertentangan dengan sistem nilai yang ada, tentunya perlu di sini pembatasan konsep secara tegas. Hal lain yang perlu dilakukan adalah perubahan sikap mental guru. Bagaimana caranya agar pembelajaran berfungsi sebagai sarana penyadaran dan perubahan, diperlukan mentalitas pendidik yang demokratis, dan berfungsi sebagai fasilitator.

Pekerjaan ini membutuhkan perhatian semua pihak. Dalam kesempatan mubes alumni PKn ini, melalui makalah singkat penulis berbagi ide bahwa perlunya kita kembali mengkaji dan mendefinisikan konsep kewarganegaraan (*citizenship*) dan pendidikan kewarganegaraan, serta implikasi pedagogik yang terkait dengan konsep tersebut.

PERGESERAN MAKNA KEWARGANEGARAAN (CITIZENSHIP)

Menurut Wikipedia (*online. Free-encyclopedia*) istilah *citizenship* berawal dari jaman kuno abad ke enam sebelum masehi. Secara historis istilah ini merupakan konsep yang mencerminkan perubahan hubungan antara individu dengan negara. Di dalam konsep ini terkandung nilai peradaban yang

berasal dari peradaban timur dan juga peradaban barat. Ada satu pandangan umum yang mengatakan bahwa hubungan individu dengan negara pada zaman kuno lebih sederhana dari bentuknya dari hubungan serupa di zaman modern. Lebih jauh dalam ensiklopedi ini diungkapkan bahwa kajian tentang warga negara dan negara ini dimulai sejak jaman Yunani Kuno, di mana *citizenship* dipahami sebagai reaksi terhadap ketakutan dengan perbudakan; tetapi ini ditandai sebagai awal dari kewarganegaraan modern dengan adanya partisipasi politik warga. Selanjutnya di jaman Romawi konsep *citizenship* lebih ditekankan pada sifat hubungan warga negara dengan negara, dengan sedikit partisipasi warganegara dibanding jaman sebelumnya. Di abad pertengahan di Eropa, konsep *citizenship* lebih dilihat sebagai kehidupan warganegara yang bersifat sekuler dan komersial dalam kota-kota yang sedang berkembang. Lebih lanjut konsep ini dianggap sebagai keanggotaan dalam negara bangsa yang mulai tumbuh. Di abad modern, konsep *citizenship* ini memiliki makna yang kontradiktif, di satu sisi pandangan individualis liberal yang mengutamakan perlindungan hukum bagi kebutuhan dan kekayaan dari anggota atau warga yang sifatnya pasif secara politik, sementara di sisi lain pandangan *civic republican* yang menekankan pentingnya partisipasi politik warganegara dengan sifat hubungan yang aktif antara warga negara dengan negara berdasarkan hak dan kewajiban yang jelas. Dikotomi ini menjadi konsep yang mengutamakan hak dan atau kewajiban. Selanjutnya konsep ini menjadi acuan dalam memahami konsep kewarganegaraan beserta implikasinya dalam pendidikan (Evans, 2006).

Dewasa ini dalam konsep modern, sebagaimana disimpulkan Mohammad Saleem Al Zboon, (2014) *citizenship* merupakan tantangan besar bagi negara modern dan warganya baik dalam membangun kesadaran warganegara terhadap hak dan kewajiban juga kesadaran tentang hal-hal yang menyedihkan seperti merebaknya korupsi, rendahnya loyalitas. Negara modern bukan sekedar lembaga, konstitusi, tentara, hukum tetapi negara modern merupakan sebuah komunitas yang didasarkan pada kerjasama terpadu dengan interaksi yang akrab

sesama warga Negara, dan sekaligus mereka merupakan sumber kekuasaan.

Lebih jauh lagi hari ini dalam abad teknologi makna *citizenship* mengalami perubahan bersamaan dengan pergerakan transformasi global (*global transformation movement*). Tanpa disadari melalui media sosial, kita bisa mengamati terjadinya satu proses pembentukan “komunitas-komunitas” yang memiliki satu kesadaran kolektif, baik dalam bentuk kesadaran politik, spiritual, kelompok, semuanya membentuk komunitas yang akrab, dekat, saling menyapa tetapi tidak mengenal satu sama lain. Hari ini bisa kita lihat bahwa konsep “*imagined community*” dari Benedict Anderson (2001), yang dilihatnya sebagai proses menuju persatuan bangsa, telah berkembang menjadi bentuk baru yang mungkin memperkuat atau memperlemah persatuan

Fenomena ini bukan sesuatu yang statis tetapi bergerak dan akan terus berubah menuju bentuk yang tidak pasti. Demikian juga konsep *citizenship* berada dalam lingkaran proses ini. Rhonda Fabian (2015) melaporkan satu studi tentang bagaimana proses ini terjadi yang disebut dengan pergerakan transformasi global. Dari studi ini dapat diidentifikasi ciri dari transformasi global ada lima.

1. Proses ini tidak milik pribadi, lembaga, atau sistem keyakinan tertentu. Proses transformasi ini merupakan organisasi yang terbentuk sendiri dari dinamika organisasi-diri (*self-organization*); proses ini merupakan sebuah rangkaian cerita yang sedang berlanjut (*a story in process*) tidak ada disain yang terbentuk sebelumnya tetapi merupakan cerita dari orang-orang yang bekerja sama menghadapi tantangan-tantangan dunia yang mendalam. Dari proses ini terbentuk satu pengorganisasian diri secara perlahan yang menjembatani jarak dan berbagai perbedaan. Media sosial adalah sarana membangun komunikasi sehingga terbentuk kesepakatan-kesepakatan bersama dari kelompok-kelompok yang berhubungan satu sama lain.
2. Proses ini merupakan pergerakan yang dipicu oleh nilai. Misalnya, isu-isu keadilan, perdamaian, penghijauan, hak azasi merupakan factor-faktor yang menjadi pertimbangan

dalam mencari bentuk perubahan global yang baik. Responden dari studi ini menegaskan bahwa hasil yang diharapkan dari transformasi global adalah terbentuknya nilai-nilai bersama, menghargai keragaman, keadilan ekonomi dan iklim. Agar fokus untuk memperkuat nilai perlu dibangun komunikasi, pendidikan, sumber daya bersama, dan aktivitas lokal.

3. Proses transformasi ini menghendaki bentuk pendidikan alternatif. Pendidikan berdasarkan tempat dan langsung ke target sasaran merupakan bentuk pendidikan alternatif terhadap pendidikan kelas secara tradisional. Pendidikan yang dikehendaki langsung bermanfaat dan sesuai kebutuhan.
4. Proses transformasi menghendaki proses improvisasi. Proses ini tidak kaku tetapi bergerak dalam dinamika yang sesuai dengan perjalanannya.
5. Proses transformasi global merupakan sesuatu yang bersifat spiritual. Kesadaran kolektif, saling ketergantungan, kesatuan adalah hal-hal yang menyambungkan pikiran di kalangan pelaku transformasi. Konsep global *citizenship* merupakan cara untuk mengidentifikasi diri dan merefleksikan kerjasama dengan dunia.

Proses perubahan global juga mempengaruhi makna kewarganegaraan. Makna *citizenship* bergeser dari dimensi tunggal ke konsep yang multidimensi antara lain dimensi sosial, dimensi ruang, dan dimensi kultural. Makna kewarganegaraan (*Citizenship*) lebih dari sekedar hubungan warga negara dengan negara, tetapi di dalamnya terkandung sekumpulan hak dan kewajiban dari warga negara terhadap negara dan hak serta kewajiban dari negara kepada warganya. Kumpulan hak dan kewajiban ini ditegaskan secara legal sebagai implikasi dari keterikatan warga negara terhadap masyarakat. Dimensi ini merupakan dimensi sosial-legal yang mengandung implikasi dalam pengembangan kewarganegaraan sebagai upaya pengembangan kesadaran tanggung jawab sosial dengan menanamkan harapan dan nilai-nilai dari sistem sosialnya.

Kewarganegaraan adalah kepatuhan pada kesepakatan bersama yang dilegalkan melalui peraturan atau norma masyarakat.

Selain itu, dalam konsep kewarganegaraan ada juga dimensi ruang. Kewarganegaraan merupakan keterikatan warga terhadap wilayahnya atau tanah airnya yang memberi wadah bagi keberlangsungan hubungan warga negara dengan faktor-faktor lain. Dalam konteks ini terkandung makna “bangsa” sebagai keterikatan orang-orang dengan adanya hak dan kewajiban yang terjadi sebagai konsekuensi legal adanya sebuah negara. Implikasinya, pengembangan kewarganegaraan merupakan upaya mengembangkan identitas kebangsaan (nasionalisme) warga, kesetiaan atau loyalitas, juga integritas pribadi yang menjunjung nilai luhur dari bangsanya.

Selain itu, dalam konsep kewarganegaraan ada dimensi kultural. Keterikatan orang terhadap masyarakat, wilayah, tidak bisa lepas dari keterikatan terhadap budaya. Pengembangan kewarganegaraan yang tidak berangkat dari pemahaman budaya di mana dia berada, akan mengalami kegagalan. Banyak contoh dari pembangunan masyarakat terasing menjadi terbelakang karena pengembang mengutamakan pendekatan yang *top down*, jauh dari kearifan budaya lokal. Selain itu, dimensi budaya perlu penegasan, untuk membentengi laju perkembangan nilai-nilai dan cara hidup yang jauh dari keluhuran. Konsep ini ditempatkan dalam konteks masyarakat multikultural, dengan masyarakat yang punya jati diri dan keteguhan dalam memegang prinsip moral yang religius bukan liberal.

Dimensi-dimensi ini membentuk sinergi yang menjadi identitas warganegara. Warganegara yang baik tidak dapat lagi diukur dari konsep hak dan kewajiban belaka dalam hubungannya dengan negara. Warganegara yang baik lebih luas lagi adalah warga sosial, warga politik, warga budaya yang memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat, sekaligus wawasan global.

Sehubungan dengan ini Al Sabeelah dkk (2015) dalam penelitiannya tentang pemahaman mahasiswa Yordania tentang kewarganegaraan (*citizenship*) menyimpulkan adanya empat dimensi kewarganegaraan: identitas, keterikatan dan rasa

memiliki, pluralisme atau menghormati orang lain, serta kebebasan dan partisipasi politik. Sejalan dengan ini Al Zboon (2014) mengurai konsep kewarganegaraan dengan unsur-unsur: rasa memiliki, loyalitas, hak, kewajiban, keadilan, kerjasama, solidaritas, kesetaraan, tanggung jawab, partisipasi, nasionalisme, dan kesatuan bangsa.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, konsep kewarganegaraan baru juga mulai berkembang yang dikenal dengan "*digital citizenship*" kewarganegaraan digital. Dalam konsep ini makna kewarganegaraan lebih bersifat aktif dalam mengupayakan nilai-nilai demokrasi dibanding dengan konsep lama yang lebih pasif dengan hanya menyerap informasi dari media massa (Simsek & Simsek, 2013). Dalam kewarganegaraan digital mencakup keasadaran tentang isu-isu budaya, sosial, etika yang terkait dengan teknologi kemampuan dalam menggunakan web dan teknologi untuk pengembangan diri sebagai proses belajar sepanjang hidup. Dalam hal ini konsep kewarganegaraan mengandung domain-domain etika, komunikasi, edukasi, akses atau partisipasi, komersial, hak, tanggung jawab, kenyamanan, dan keamanan. Dalam konsep ini, kewarganegaraan mengandung implikasi lebih dari konsep kewarganegaraan sebelumnya, yakni adanya proses yang berkelanjutan, dan tanpa disadari membawa perubahan dalam sikap dan prilaku warga negara.

Perubahan dimensi kewarganegaraan ini perlu menjadi perhatian para pendidik. Perubahan ini menghendaki perubahan dalam cara-cara pendidik menyusun fokus materi pembelajaran, arah dari proses pembelajaran, pemilihan strategi pembelajaran dan juga pengembangan bentuk-bentuk penilaian.

IMPLIKASI BAGI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Implikasi pertama tentang isi pendidikan kewarganegaraan. Di Negara-negara maju para pemerhati pendidikan kewarganegaraan sangat respon terhadap perkembangan yang terjadi. Sebagaimana dieksplorasi oleh Mark Evans (2006), seperti di Kanada konsep kewarganegaraan di kembangkan dengan istilah 12Cs: *cosmopolitan, thinking critically and creatively, informed and involved in one's community locally, nationally, and globally*. Di

Inggris konsep ini juga bervariasi, ada ahli yang memasukan kedalam konsep kewarganegaraan struktur dan proses pemerintahan, disamping konsep identitas, keragaman, dan literasi politik.

Di Indonesia, dengan kurikulum 2013 perubahan isi pendidikan kewarganegaraan juga terjadi sebagai respon terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang ditenggarai dengan kehilangan karakter dan melonggarnya nilai-nilai moral. Dapat diamati bahwa isi kurikulum dibagi dalam empat kompetensi inti (sikap spiritual, sikap social, pengetahuan dan keterampilan). Khusus bagi Pendidikan Kewarganegaraan, didukung dengan materi yang dijabarkan dari nilai Pancasila, UUD 1945, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pengembangan materi ini disinergikan dengan pengembangan kompetensi yang meliputi sikap (memiliki prilaku beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi); pengetahuan (pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif dalam iptek, seni, budaya); dan keterampilan (kemampuan fikir dan tindak yang efektif dan kreatif). Dalam prakteknya, empat poin di atas dijadikan patokan atau standar bahwa kemampuan dan keluasan pengetahuan warga negara ada dalam bingkai kebangsaan dan kesadaran nilai-nilai luhur bangsa. Hal ini memerlukan kajian dan analisis kurikulum yang detail sehingga dapat digali konsep-konsep utama bidang ilmu terkait. Jika tidak demikian, maka kehadiran kurikulum 2013 belum mampu menjawab tantangan masyarakat yang ada.

Implikasi lain dari perubahan isi kurikulum ini, berkaitan aspek pedagogik. Dalam kurikulum 2013, pembelajaran dikembangkan dengan langkah-langkah saintifik. Prinsip pedagogis yang berorientasi siswa mendapat tempat yang cukup luas dalam kurikulum 2013. Untuk kemudahan pelaksanaan pendekatan ini disederhanakan dengan langkah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi (mangasosiasi), dan mengkomunikasikan. Dengan pendekatan ini siswa dilatih untuk menerapkan proses berpikir seperti ilmuwan (sosial). Dengan demikian diharapkan akan muncul

siswa yang berpikir sistematis, kritis, dan mampu memecahkan masalah. Berbeda dengan negara maju seperti Kanada dan Inggris, respon masyarakat, pemerintah, pemerhati sangat luas sekali, dengan berkembangnya riset-riset dan pengembangan model-model pembelajaran yang sejalan dengan perubahan konsep kewarganegaraan (Evan 2006), di Indonesia setelah dua tahun berjalan, dilihat dari aspek penggunaan kurikulum 2013 belum merata di seluruh sekolah. Perubahan pedagogic dalam kurikulum baru sebatas tawaran yang masih perlu sosialisasi.

Lahirnya kurikulum 2013 sebagai respon terhadap kondisi sosial, baik dari segi isi maupun pedagogik kurikulum 2013 masih perlu dikembangkan lagi. Misalnya dari segi makna kewarganegaraan, perlu adanya ketegasan apakah pengembangan konsep warganegara yang baik dilihat dari dikotomi hak dan kewajiban secara timbal balik antara negara dengan warga negara, atau kita perlu mengembangkan konsep warganegara yang multidimensi (sosial, spasial, dan kultural). Arah kompetensi lulusan yang dikembangkan kurikulum masih sangat general dan diberlakukan untuk semua mata pelajaran. Khusus untuk pendidikan kewarganegaraan, belum ada kejelasan seperti apa konsep warganegara yang baik dalam konteks pengembangan kewarganegaraan. Lebih jauh ketidakjelasan konsep ini membawa akibat pendekatan saintifik yang menjadi ciri pedagogic kurikulum 2013, sebatas langkah formalitas yang diterapkan guru untuk memenuhi tuntutan kurikulum.

Jawaban hal itu sudah jelas, bahwa pengembangan konsep warganegara multidimensi menjadi penting ketimbang hanya konsep kewarganegaraan yang dilihat dari konteks hak dan kewajiban saja. Keluasan persoalan dalam masyarakat perlu dijawab dengan perluasan wawasan kewarganegaraan. Konsep kewarganegaraan ini mencakup dimensi sosial (sistem nilai, literasi politik kenegaraan), dimensi spasial (Negara kesatuan RI, wawasan kebangsaan, belanegara), dan dimensi kultural (multikultural, kecerdasan kultural, literasi media). Pengembangan ini perlu didukung oleh kekuatan organisasi profesi

sebagai pengembang kurikulum, dan kajian-kajian akademik dari para ahli.

Dari segi pedagogik, sangat diperlukan perubahan paradigma. Dalam praktek pendidikan kewarganegaraan saat ini mayoritas guru masih berada dalam paradigma transfer pengetahuan. Guru masih terikat dengan berbagai tuntutan nonakademik yang menyebabkan mereka lebih cenderung menguasai proses pembelajaran untuk mengarahkan siswa menguasai materi, dan mengabaikan aspek pembentukan kompetensi kewarganegaraan (Moeis, 2010). Ukuran penguasaan materi melalui ujian masih mendominasi bentuk-bentuk pembelajaran, meskipun guru menggunakan bungkus pendekatan saintifik. Untuk menghadapi pergeseran konsep kewarganegaraan menjadi multidimensi, maka paradigma transformatif sangat diperlukan (Moeis, 2014) yakni menempatkan pendidikan sebagai basis perubahan sekaligus memiliki kekuatan untuk menyeleksi dampak perubahan. Paradigma ini menuntut guru dan siswa dalam posisi sama sebagai subjek, dengan pembelajaran yang bersifat dialogis, konstruktif, dan tranformatif. Paradigma transformatif memiliki dimensi pribadi dan sosial. Dalam dimensi pribadi pembelajaran dimulai dari penyadaran (*uncovering own identity*) - melihat kekuarangan diri dan segala pengaruhnya - memperbaiki diri. Sedangkan dimensi sosial penyadaran (*uncovering own identity*) - empati - perbaikan hubungan antar diri.

Uraian singkat ini, semoga dapat memberi inspirasi bahwa banyak hal yang perlu dibenahi dalam pembelajaran kewarganegaraan. Untuk itu diperlukan kajian-kajian ilmiah dan akademik yang dikembangkan atas dasar kerjasama akademisi dan praktisi.

Selamat berseminar dan Mubes ILUNI PKn UNP 2015.

REFERENSI

Anderson, Benedict (2002) *Imagined Community: reflectios the Origin and Spread of Natonalism*. Edisi terjemahan. Jogjakarta: INSIST Press.

- Al Azboon, Muhammed Saleem (2014) "Degree of Student's Assimilation to the Meaning of the term of *Citizenship* in the High School Grade basic Level in Jordan." *International Education Studies* Vol 7 no 2 2014. Published by Canadian Center of Science and Education (EJ1068919).
- Al Sabeelah, Amal; Al Ragaad, Fatima, & Abou Ameth, Oraib (2014) "The dimensions of *Citizenship* Concept among the Jordanian University Students." *International Education Studies* Vol 8, no 8 (2015). Published by Canadian Center of Science and Education (EJ 1070794).
- Evans, Mark (2006) "Educating for *Citizenship*: what teachers say and what teachers do." *Canadian Journal of Education*, 29, 2 (2006) 410-435. Fabian, Rhonda (2015) Five Insights about Global Transformation from the Kosmos Study, Connecting for Change, Kosmos Journal / October 6, 2015 Newsletter.
- Moeis, Isnarmi, AL Rafni, Junaidi Indrawadi (2010) "Otoritas Guru dalam Pembelajaran dalam Konteks Pendidikan Kritis di SMAN Kota Padang." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol 16 No 4, Juli 2010.
- Moeis, Isnarmi (2014) *Pendidikan Multikultural Transformatif*. Padang: UNP Press.
- Simsek, Eylem & Simsek, Ali (2013) "New Literacies for digital *Citizenship*." *Contemporary Educational Technology*, 2013, 4 (2) 126-137 (ED542213).